

Kata Pengantar

“Membantu Gubernur Dalam Menentukan Kebijakan
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
Berlaku”

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja, penyusunan laporan laporan kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jambi, Januari 2025

Kepala,
Bappeda Provinsi Jambi.



Ir. AGUS SUNARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19660814 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Cascading Kinerja	4
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3 Isu Strategis	18
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	19
1.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Tahun 2024.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026	48
2.2 Tujuan dan Sasaran	49
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024.....	51
2.4 Rencana Kerja Tahun 2024.....	52
2.5 Perjanjian Kinerja 2024.....	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	55
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	56
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	62
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024	90
3.5 Analisis Efisiensi	97
3.6 Inovasi	100
3.7 Penghargaan	102
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan dan Tindak Lanjut Kedepan.....	103
Lampiran-Lampiran	105

DAFTAR TABEL dan DAFTAR GAMBAR...

A. GAMBAR.

Gambar	: 1.1 Casseding Kinerja.....	05
Gambar	: 1.2 Struktur Organisasi.....	17
Gambar	: 1.3 Keadaan Karyawan/karyawati Bappeda Prov. Jambi.....	19
Gambar	: 3.1 Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	99

B. TABEL.

Tabel	: 1.1 Jumlah SDM ASN Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024	19
Tabel	: 1.2 Jumlah SDM ASN Dari Tingkat Pendidikan Tahun 2024	20
Tabel	: 1.3 Jumlah SDM ASN Dari sisi Pangkat dan Golongan	20
Tabel	: 1.4 Jumlah SDM ASN Dari sisi Usia dan Jenis Kelamin	21
Tabel	: 1.5 Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Jambi Tahun	22
Tabel	: 2.1 Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Jambi	49
Tabel	: 2.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jambi	50
Tabel	: 2.3 Arah dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi	51
Tabel	: 2.4 Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jambi	53
Tabel	: 2.5 Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Bappeda Tahun 2024	54
Tabel	: 3.1 Tabel dan Skala Nilai	55
Tabel	: 3.2 Tujuan, Indikator, Sasaran Indikator Sasaran 2021-2026	58
Tabel	: 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024	59
Tabel	: 3.4 Target Kinerja Tahun 2024	61
Tabel	: 3.5 Target Realisasi Indikator Sasaran	62
Tabel	: 3.6 Rumusan Indikator	64
Tabel	: 3.7 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	64
Tabel	: 3.8 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	65
Tabel	: 3.9 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	67
Tabel	: 3.10 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	67
Tabel	: 3.11 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	70
Tabel	: 3.12 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	70
Tabel	: 3.13 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	72
Tabel	: 3.14 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	72
Tabel	: 3.15 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	74
Tabel	: 3.16 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	74
Tabel	: 3.17 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	76
Tabel	: 3.18 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	76
Tabel	: 3.19 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	79
Tabel	: 3.20 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	79
Tabel	: 3.21 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	83
Tabel	: 3.22 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	83
Tabel	: 3.23 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	84
Tabel	: 3.24 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	84
Tabel	: 3.25 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.	86
Tabel	: 3.26 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran	86
Tabel	: 3.27 Rekapitulasi Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2024	90
Tabel	: 3.28 Analisis Efisiensi Bappeda Tahun 2024	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

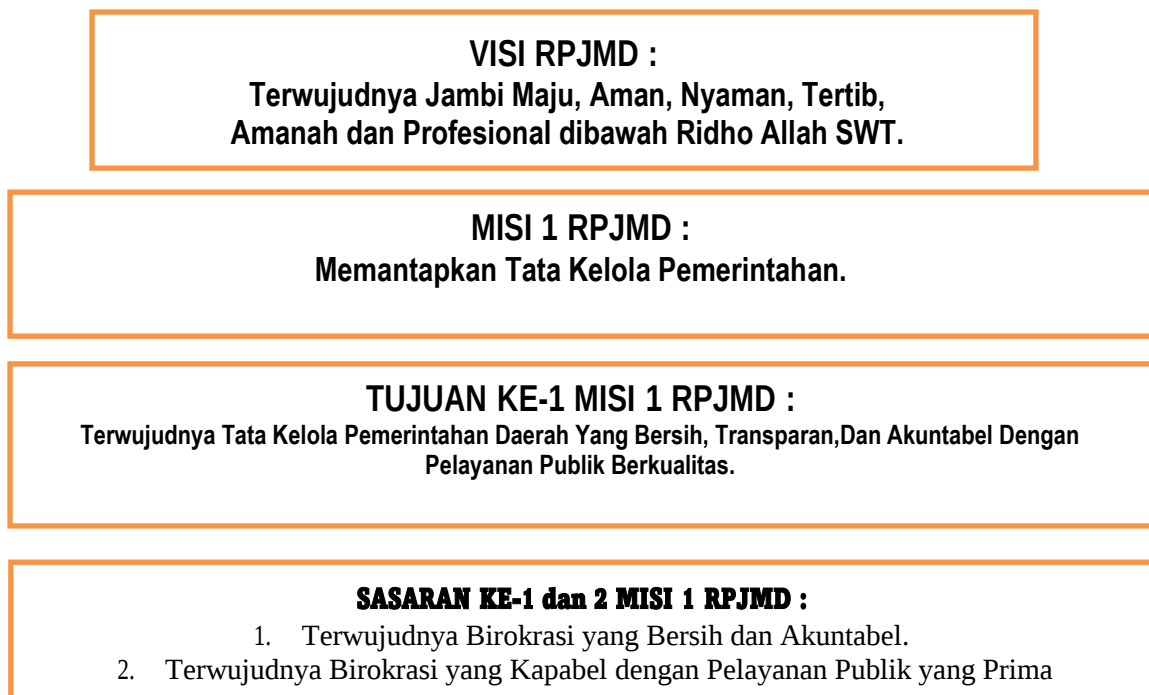
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Anstansi Pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" sebagai persyaratan setiap instansi, dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKJIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi menyusun LKJIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024. Sehubungan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jambi berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara.

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, ditujukan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Sebagai tindak lanjut, Bappeda Provinsi Jambi telah menyusun **casecading** dengan skema adalah sebagai berikut ini :

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



TUJUAN :

Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif
Indikator Tujuan : Indek Reformasi Birokrasi Perencanaan.

SASARAN

STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi

SASARAN

STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Akutanbilas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi

POHON KINERJA BAPPEDA

SASARAN 1 : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi

SASARAN 2 : Meningkatkan Akutanbilas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program:
Persentase Konsistensi/Kesesuaian Program Capaian Pembangunan Daerah.

Kegiatan

Indikator Kegiatan

- | | |
|--|---|
| Perencanaan, Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Konsistensi Keselarasan Dokumen Program RPJMD kedalam RPKD. |
| Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA | Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RPKD |
| Koordinasi dan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. | Konsistensi Program RPJMD Bidang SDM, Pemerintahan Pembangunan Manusia kedalam RPKD |
| Koordinasi dan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RPKD |

BAPPEDA

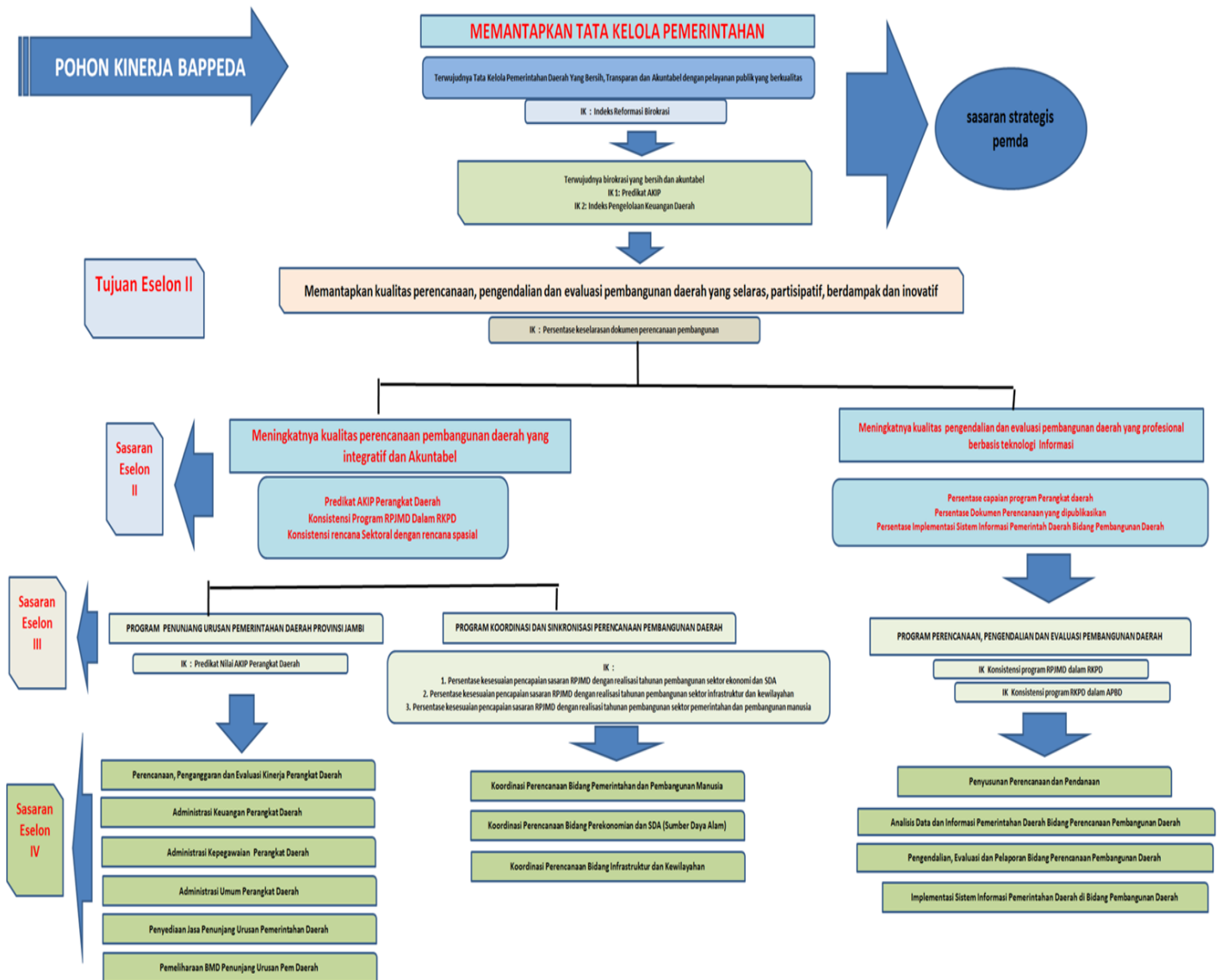


Arah Kebijakan

TUJUAN : Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif.

1. Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan Dan Sinergitas Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah

2. Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Kebijakan Bagi Perencanaan Pembangunan Dan Perumusan Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Bappeda Provinsi Jambi merupakan Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu aspek penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara sistematis, aspiratif, dan logis sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- b. Pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pelaksanaan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Jambi terdiri atas susunan Organisasi sebagai berikut :

- A. Susunan Organisasi Badan Terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, Membawahi:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program; dan
 - c) Subbagian Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Membawahi:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c) Subbidang Pengendalian, evaluasi, dan Pelaporan;
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Membawahi:
 - a) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
 - c) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Membawahi:
 - a) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
 - c) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Membawahi:
 - a) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 - c) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- C. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- D. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- E. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi kinerja; administrasi keuangan; dan administrasi umum Badan;
2. pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum Badan;
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sub Bagian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menghimpun dan menyiapkan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
4. mengelola administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan penatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
6. melaksanakan pengadaan, pencatatan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian program mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
2. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
3. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi Badan;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
5. melaksanakan evaluasi kinerja Badan, menghimpun dan menyusun kebijakan teknis perencanaan Badan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
4. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
5. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
6. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. pelaksanaan koordinasi dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. pelaksanaan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
3. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah serta sinkronisasi dan analisa kebijakan penganggaran;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan forum Badan/lintas Badan;
- c. melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
- f. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan monitoring program dan kegiatan pembangunan daerah;

- c. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait standar pelayanan minimal;
- d. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

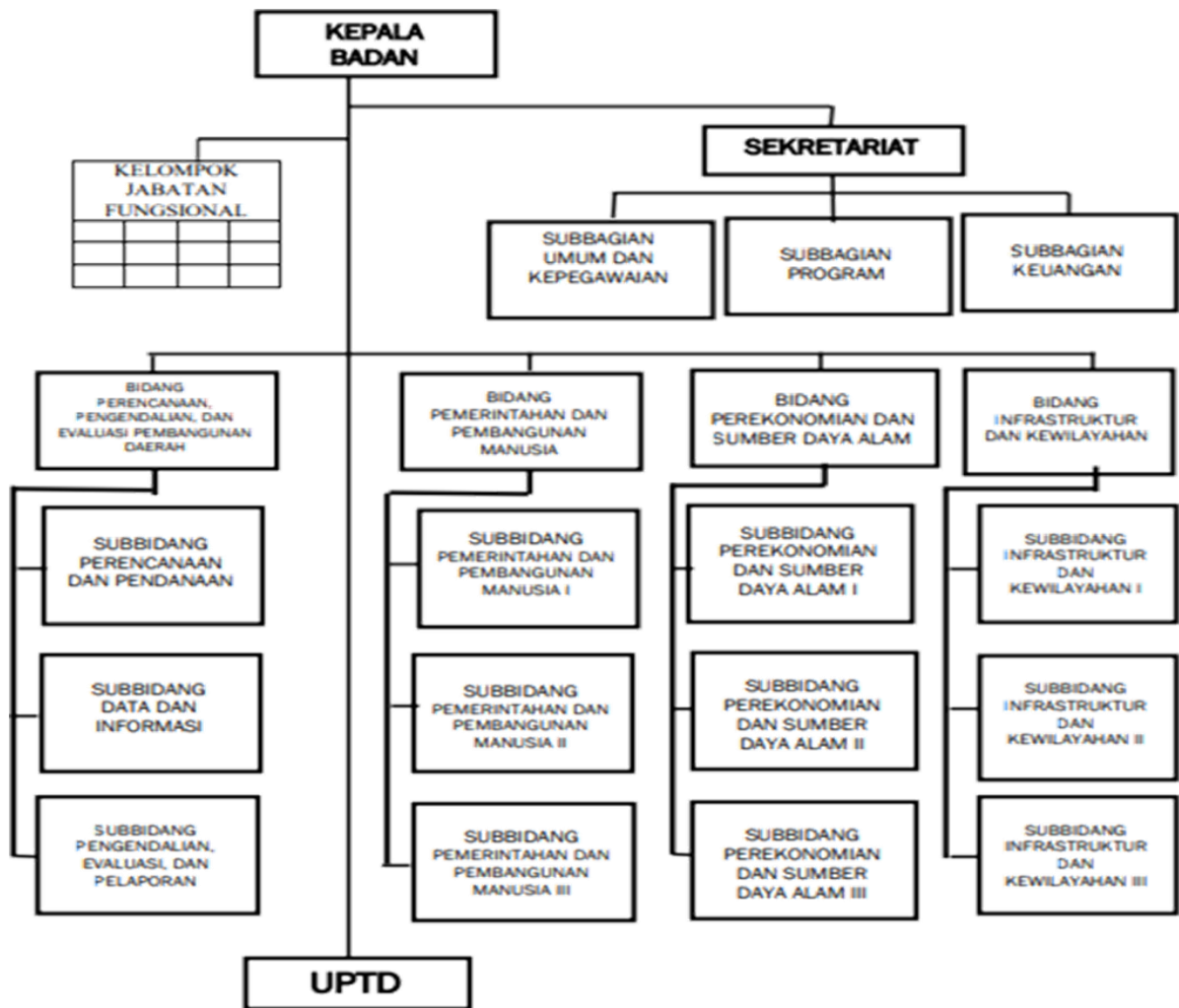
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi



Sumber : PERGUB Nomor 46 Tahun 2020.

1.3. Isu-isu Strategis

Sebagaimana tugas Bappeda yaitu menuntut semua *stakeholder* yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi, sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya penyedia. Bappeda Provinsi Jambi dihadapkan berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya pencapaian Target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs), Penurunan Angka Kemiskinan, Penurunan Angka Stunting Dan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi yaitu :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia perencana yang proporsional sesuai kebutuhan;
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan *holistik, integrative*, tematik spasial yang belum optimal;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan pemerintah pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
4. Peningkatan Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD; dan
5. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Aplikasi SIPD) yang Terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan lainnya (e-data, e- Budgeting, e- Monev dan e-reporting, e-paket) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

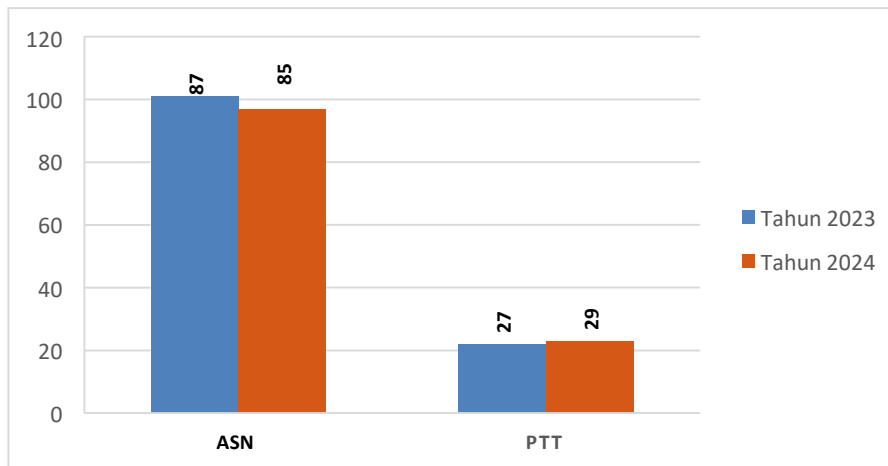
Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jambi merumuskan program prioritas perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam Bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM),

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 114 orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara sebanyak 85 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 29 orang. Secara kelembagaan terdapat 21 pejabat struktural, 15 pejabat fungsional tertentu, dan yang lain adalah pejabat fungsional umum. Berikut perbandingan keadaan pegawai Bappeda Provinsi Jambi dengan tahun sebelumnya :

Gambar 1.3

Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah Aparatur Sipil Negeri dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 87 orang dan pada Tahun 2024 jumlahnya berkurang adalah menjadi 2 orang sehingga berjumlah 85 orang serta adanya penambahan jumlah Pegawai Tidak Tetap dari tahun sebelumnya, yang jumlah awalnya 27 orang bertambah menjadi 29 orang. Profil Kepegawaian Bappedaa Provinsi Jambi Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Eselonning Tahun 2024

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	II/A	1	Kepala Badan
2	III/A	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	IV/A	15	Kasubbag
4	PELAKSANA/Staf	64	-
Jumlah		85	-

Untuk tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN							KET
	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	-	-	10	5	35	32	3	
JUMLAH	85							

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Sedangkan untuk jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut pangkat/golongan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Pangkat/Golongan

NO	STATUS	PANGKAT/GOL	JUMLAH/ORANG
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/a	0
2	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/b	2
3	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/c	4
4	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/d	2
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/a	7
6	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/b	10
7	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/c	10
8	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/d	32
9	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/a	9
10	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/b	4
11	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/c	4
12	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/d	1
JUMLAH			85

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024 yaitu sebanyak 85 orang dengan rentang usia dan rincian laki-laki/ perempuan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Usia dan Jenis Kelamin

NO	RENTANG USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	25-29	2	4	6
2	30-34	-	2	2
3	35-39	4	8	12
4	40-44	7	18	25
5	45-49	10	8	18
6	50-54	10	1	11
7	55-keatas	9	2	11
Jumlah..		42	43	85

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.5. Dukungan Sarana dan Prasarana.

Dukungan sarana dan prasarana kantor mengacu pada segala fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana adalah alat atau benda langsung yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang memungkinkan sarana berfungsi dengan baik. Contoh Sarana Kantor: Komputer, laptop, dan perangkat teknologi lainnya. Meja, kursi, lemari arsip, dan peralatan kantor. Alat tulis dan bahan habis pakai (ATK), seperti kertas, pulpen, printer, tinta. Contoh Prasarana Kantor: Gedung kantor dan ruang kerja yang memadai. Sistem jaringan internet dan listrik. Ruang rapat, ruang arsip, ruang istirahat. Sistem pengelolaan air, ventilasi, dan kebersihan.

Pentingnya dukungan sarana dan prasarana kantor adalah untuk :

- Produktivitas : Meningkatkan efisiensi kerja karyawan.
- Kenyamanan : Memberikan lingkungan kerja yang mendukung.
- Keberlanjutan Operasi : Memastikan kegiatan kantor berjalan tanpa hambatan teknis.
- Citra Profesional : Menunjukkan profesionalisme organisasi kepada pihak eksternal.

Untuk itu sarana dan prasarana untuk di Kantor Bappeda Provinsi Jambi Adalah Sebagai Berikut :

Tabel : 1.5

Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikasi No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH Barang
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALAT BANTU								5
POMPA								5
Mesin Air	Tanpa Merk		CAMPURAN	APBD	2008	Buah	KB	1
Pompa Lain-lain	Sanyo		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Pompa Lain-lain	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Pompa Lain-lain	Sanyo		Plastik/besi	APBD	2020	Unit	B	1
RO Wall Mountet Colling Drinking	Sanyo Aquapolar		Besi/Plastik	APBD	2020	unit	B	1
ALAT ANGKUTAN								37
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR								36
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN								14
Minibus Daihatsu/Hiline R69	BH 1036 AZ	No. Mesin	Besi	APBD	1991	Unit	RR	1
Minibus Toyota Kijang	BH 2483 AZ	0215450 No. Casis	Besi	APBD	1998	Unit	B	1
Minibus Tab Heline	B 1204 AX		Besi	APBD	2001	Unit	B	1
Minibus Toyota Kijang Innova G.20	BH. 1533	No. Mesin 1TR-6723885	Besi	APBD	2009	Unit	B	1
		No. Rangka MHFXW42G492 135471						
Minibus Daihasu Terios Deluxe	BH. 1765 Z	No. Mesin DBE2303	Besi	APBD	2009	Unit	B	1
		No. Rangka MHKG2CJ2J9K 020912						
Minibus Daihasu Terios Adventure	BH. 1354 Z	No. Mesin DBW3306	Besi	APBD	2010	Unit	B	1
		MHKG2CJ2JAK						
Minibus Daihasu Terios Adventure	BH. 333	No. Mesin DBW4024	Besi	APBD	2010	Unit	B	1
		No. Rangka MHKG2CJ2JAK 037356						
Minibus Toyota Kijang Innova	BH. 1353 HZ	No. Mesin 1TR7226732	Besi	APBD	2011	Unit	B	1
		No. Rangka MHFGW4260B2 210530						
Minibus Toyota Avanza Veloz	BH. 1002	No. Mesin DDA8209	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
		No. Rangka MHKM1CA4JCK 021635						
Minibus Toyota Avanza Veloz	BH. 1003	No. Mesin DDB3486	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
		No. Rangka MHKM1CA4JCK 022296						
Minibus Toyota Avanza Veloz	BH. 1612 Z	No. Mesin DDA8209	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
		No. Rangka MHKM1CA4JCK 021635						
Minibus Ford	BH. 1737 Z	No. Mesin L310533211	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
		No. Rangka PE2EV2481C1JS 00379						
C-HR 1.8 A/T Single Tone - VIN	BH 34	No. Mesin 2ZRY509034	Besi	APBD	2019	Unit	B	1
		No. Rangka MR2KL3BX1310 06714						
Minibus Misubhisi Espander 1.5	BH 1088 Z	No. Mesin 4A91HN4887	Besi	APBD	2020	Unit	B	1
		No. Rangka MK2NCLHANKJ 000531						

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG							3	
	Pick Up Misubishi Strada	BH. 260	No. Mesin 4D56UCBH3326	Besi	APBD	2008	Unit	B	1
			MMBJNKB409D						
	Pick Up Toyota Hilux	BH. 8419 Z	No. Mesin 2KD- S409237	Besi	APBD	2014	Unit	B	1
			No. Rangka MROFR22GXEO 785349						
	Pic-Up Mitsubishi Triton 2.4	BH 8033 Z	No. Mesin 4N1SUGX6479	Besi	APBD	2020	Unit	B	1
			No. Rangka MMBJI.KI.101.H 046306						
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA								19
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 8514 AZ	No. Mesin NEE- 1177135	Besi	APBD	1995	Unit	B	1
			No. Rangka MH1NE000RRK 176793						
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 8692 AZ	No. Mesin NFE- 11465750	Besi	APBD	1996	Unit	B	1
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 2630 AZ	No. Mesin NFE- 1306914	Besi	APBD	1996	Unit	B	1
			No. Rangka MH1NF000TTK3 18464						
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 5371 AZ	No. Mesin NFGE-1099867	Besi	APBD	1996	Unit	B	1
			No. Rangka MH1NFG00TTK0 99581						
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 5396 AZ	No. Mesin nfge- 1077879	Besi	APBD	1996	Unit	B	1
			No. Rangka MH1NFG00TTK0 76637						
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 5654 AZ	No. Mesin nfge- 119511	Besi	APBD	1997	Unit	B	1
	Sepeda Motor Honda Grand	BH 5189 AZ	nfge1504315	Besi	APBD	1997	Unit	B	1
			No. Rangka MH1NFG00VVK 508879						
	Sepeda Motor Honda Vario	BH. 2452 HZ	No. Mesin kc12e-1137280	Besi	APBD	2008	Unit	B	1
			No. Rangka MH1JF12118K5 42023						
	Sepeda Motor Honda CS12ARR	BH. 2825 HZ	No. Mesin JBA1E-1122524	Besi	APBD	2010	Unit	B	1
			No. Rangka MH1JBA117AK1 23631						
	Sepeda Motor Honda Supra X	BH. 2854 HZ	No. Mesin JB91E-2202530	Besi	APBD	2010	Unit	B	1
			No. Rangka MH1JB9129AK2 08641						
	Sepeda Motor Honda Supra X	BH. 2855 HZ	No. Mesin JB91E-2225212	Besi	APBD	2010	Unit	B	1
			No. Rangka MH1JB912XAK2 32253						
	Sepeda Motor Honda Mega Pr	BH. 3323 HZ	No. Mesin KC31E-1211622	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
			No. Rangka MH1KC3114CK2 11827						
	Sepeda Motor Honda CS12AR	BH. 3326 HZ	No. Mesin JB1E-1138888	Besi	APBD	2012	Unit	B	1
			No. Rangka MH1JBA118CK1 40909						
	Sepeda Motor Yamaha Mio Z	BH. 4783 HZ	No. MesinE3R2E- 0900125	Besi	APBD	2016	Unit	B	1
			No. Rangka MH3SE8890GJ0 15510						

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

24

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Televisi	Samsung		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Televisi	Samsung		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Televisi	Samsung		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Televisi Berwarna	Sony 29"		BESI	APBD	2002	Unit	B	1
Papan Visual Elektronik	Tanpa Merk		Besi	APBD	2013	Set	B	1
Papan White Board	Aluminum/Triplek		Kayu	APBD	2009	Buah	B	1
White Board Elektronik	Oki Elektronik		KAYU	APBD	2000	Buah	B	1
White Board	Lokal		KAYU	APBD	1999	Buah	B	1
White Board	Lokal		KAYU	APBD	1989	Buah	B	1
White Board	Tanpa Merk		KAYU	APBD	1996	Buah	B	1
White Board	Tanpa Merk		KAYU	APBD	1996	Buah	B	1
White Board	Tanpa Merk		KAYU	APBD	1998	Buah	B	1
White Board	Tanpa Merk		KAYU	APBD	2006	Buah	B	1
Peta Jambi	Lokal		KAYU	APBD	2000	Paket	KB	1
Peta Jambi	Lokal		KAYU	APBD	2000	Paket	KB	1
Mesin Penghancur Kertas	Tori TMA		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	Tori TMA		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	Tori TMA		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Penghancur Kertas	44101608-PKM-00465731		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Penghancur Kertas	HSM Paper Shredder Cross		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Mesin Absensi	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2008	Buah	B	1
Exhoust Fan	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2014	buah	B	1
Belanja Infocus	EB-1761-W		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Belanja Infocus	EB-1761-W		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Belanja Infocus	EB-1761-W		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Infocus	Toshiba		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Infocus Portable	SMART BEAM		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Infocus Portable	SMART BEAM		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Infocus Portable	SMART BEAM		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Infocus Portable	SMART BEAM		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Projektor/Invocus	Benq		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Projektor/Invocus	Benq		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Projektor/Invocus	Benq		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Projektor/Invocus	Epson EB-X51		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
Pengadaan Multi Media Proje	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Multi Media Proje	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Multi Media Proje	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Multi Media Proje	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Multimedia Proyektor	Toshiba		Besi/plastik	APBD	2009	Set	B	1
Pengadaan Multi Media	Tanpa Merek		Plastik/besi	APBD	2013	Paket	B	1
Over Head Proyektor	Tanpa Merk		BESI	APBD	1997	Buah	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Lcd Proyektor	Epson EB-2055/X300		Besi	APBD	2017	unit	B	1
LCD Proyektor	Thosiba TLP X 20 E		Plastik/besi	APBD	2002	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
LCD	TCD 99		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Buah	B	1
Pengadaan Keyless Doorlock	Acces Control		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Pengadaan Keyless Doorlock	Acces Control		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Kunci Pintu	Lokal		Besi	APBD	2009	Buah	B	1
Kunci Pintu	Lokal		Besi	APBD	2009	Buah	B	1
Kunci Pintu	Lokal		Besi	APBD	2009	Buah	B	1
Smart Screen Board MX075	75 Inch Interactive		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Smart Screen Board MX086	86 Inch Interactive		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Papan Nama Kantor DW	Lokal		Plastik/besi	APBD	2014	paket	B	1
Papan Nama Kantor Korpri	Lokal		Plastik/besi	APBD	2014	paket	B	1
Papan Nama Kantor	Lokal		Semen	APBD	2014	paket	B	1
Papan nama PNPM	Plastik		Plastik	APBD	2010	Paket	KB	1
Papan Pengumuman	Lokal		KAYU	APBD	2005	Buah	B	1
Layar Proyektor	Tanpa Merek		Besi/Plastik	APBD	2022	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2004	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2004	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2004	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2005	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
A C Split	Panasonic 1 Pk		Besi/plastik	APBD	2009	Buah	B	1
A C Split	Panasonic 1 Pk		Besi/plastik	APBD	2009	Buah	B	1
A C Split	Panasonic Eolia		Besi/plastik	APBD	2010	Buah	B	1
A C Split	Panasonic Eolia		Besi/plastik	APBD	2010	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2010	Buah	B	1
A C Split	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2010	Buah	B	1
Kipas Angin	Nasional		PLASTIK	APBD	1997	Buah	B	1
AC Standing	Gree		Plastik/besi	APBD	2011	Unit	B	1
AC Standing	Gree		Plastik/besi	APBD	2011	Unit	B	1
AC Standing	Gree		Plastik/besi	APBD	2011	Unit	B	1
AC Standing	Gree		Plastik/besi	APBD	2011	Unit	B	1
Ac Standing	Gree		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Standing	Gree		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Standing	Gree		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Standing	Gree		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Standing	Gree		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Ac Split	Panasonic		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Pengadaan Ac Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2013	Unit	B	1
Pengadaan Ac Split	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2013	Unit	B	1
Ac Split 2 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 2 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 2 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 2 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 2 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 1 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 1 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split 1 Pk	Panasonic/Gree		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Ac Split	1 Pk		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Ac Split	1 Pk		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Ac Split	SHARP		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Ac. Standing	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Ac. Split 1 Pk	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Ac. Split 1 Pk	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Air Conditioner	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Air Conditioner	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Air Conditioner	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Air Conditioner	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Air Conditioner	Panasonic		Besi	APBD	2017	unit	B	1
AC Split	Panasonic 2,5 PK		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Computing / AC	DAIKIN		Besi/Plastik	APBD	2020	unit	B	1
Computing / AC	DAIKIN		Besi/Plastik	APBD	2021	unit	B	1
Computing / AC	DAIKIN		Besi/Plastik	APBD	2021	unit	B	1
AC/Cassette	Gree 3 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 3 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1
AC/Cassette	Gree 2 PK		Besi/plastik	APBD	2022	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

AC Split	GUL71W/A-K		Standar	Plastik	2023	Unit	B	1
AC Cassette	Standard U Match		Standar	Plastik	2023	Unit	B	1
	GVC –							
AC Standing	48STS(S)ECO/I		Standar	Besi/Busa	2023	Unit	B	1
ALAT DAPUR								2
Piring, Mangkok/sendok, gelas	Kaca/besi		Besi/kaca	APBD	2010	Set	B	1
Kompot Gas	Winn/W218		Besi	APBD	2010	Unit	B	1
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)								132
Sound System	Sony		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Pengadaan Sound system	Bosch		Plastik/besi	APBD	2013	Paket	B	1
PC Disc Copy	LG		Plastik/besi	APBD	2014	paket	B	1
PC Disc Copy	LG		Plastik/besi	APBD	2014	paket	B	1
Wireless	Sanyo		BESI	APBD	2000	Buah	B	1
Wireless	6400 TOA		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Bendera + Tiang	Lokal		KAYU	APBD	2001	Set	B	1
Gambar Wakil Presiden	Unital		KAYU	APBD	2001	Unit	B	1
Gambar Presiden	Lokal		KAYU	APBD	2001	Unit	B	1
Lambang Garuda	Lokal		KAYU	APBD	2000	Unit	B	1
Mic Coperence	Ziz		Plastik/besi	APBD	2013	Set	B	1
Mic Confrens	Boss		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
	Ulro							
Mic Confrens	Delegate		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Mic Comperence	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	KB	1
Mic Comperence	Tanpa Merk		CAMPURAN	APBD	2002	Paket	KB	1
VCD	Sony		Plastik/besi	APBD	2002	Buah	B	1
Microphone/Bom Stand	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone/Bom Stand	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone/Bom Stand	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone/Bom Stand	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Digital Audio Storage System	HP		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Audio Visual	Sony		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Mixing Console	MX-625		BESI	APBD	2002	Unit	B	1
Lampu Automatic	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2008	Buah	KB	1
	BlackBerry							
Personal Data Asistensi	Bold 9500		Besi	APBD	2009	Unit	B	1
Warles dan Amplifier	TOA		Plastik/besi	APBD	2004	Paket	KB	1
Pengadaan Mixer Mic Confer	Bosch		Plastik/besi	APBD	2014	paket	B	1
	Sony PC 115							
Kamera Vidio	E		FIBER	APBD	2002	Buah	B	1
Camera Film	Sony		Plastik/besi	APBD	2007	Buah	B	1
Camera Film	Sony		Plastik/besi	APBD	2008	Buah	B	1
Dispencer	Hitachi		PLASTIK	APBD	2001	Buah	B	1
Dispenser	sanyo		Plastik/besi	APBD	2003	Buah	B	1
Meubelair Lainnya	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2003	Paket	B	1
Dispenser	Sanyo		Plastik	APBD	2004	Buah	B	1
Dispenser	sanyo		Plastik/besi	APBD	2005	Buah	B	1
Dispenser	Miyako		Plastik	APBD	2006	Buah	B	1
Handy Cam	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2004	Buah	B	1
Handy Cam	Sony		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Handy Cam	Sony		Plastik/besi	APBD	2007	Buah	B	1
Karpet	Nobel		KARPET	APBD	2001	Set	B	1
Tangga	Tanpa Merk		Besi	APBD	2009	Buah	B	1
Asbak	Maspion		PLASTIK	APBD	1996	Buah	B	1
Tangki Air	Rumah Kita		Plastik	APBD	2021	Unit	B	1
Tangki Air	Rumah Kita		Plastik	APBD	2021	Unit	B	1
Tangki Air	Rumah Kita		Plastik	APBD	2021	Unit	B	1
Tangki Air	Rumah Kita		Plastik	APBD	2021	Unit	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2000	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2000	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2000	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1
Horden	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2001	Set	B	1</

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Horden Lapis Dua	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Set	B	1
Kain Gorden	Tanpa Merk		KAIN	APBD	2005	Set	B	1
Unintemuptible Power Supply	ICA		Plastik/besi	APBD	2004	Paket	B	1
Unintemuptible Power Supply	Power		Plastik/besi	APBD	2007	Paket	B	1
UPS	ICA		BESI	APBD	1997	Unit	B	1
UPS	ICA		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
UPS	ICA		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
UPS	ICA		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Prolink UPS	2000VA(PRO2000SFC)		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Prolink UPS	2000VA(PRO2000SFC)		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Prolink UPS	2000VA(PRO2000SFC)		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Prolink UPS	2000VA(PRO2000SFC)		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Prolink UPS	2000VA(PRO2000SFC)		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
UPS/Stabilizer	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Buah	KB	1
Stabilisator	Matsunaga		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Stabilizer	Kyowa		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
UPS	ICA		BESI	APBD	2019	Unit	B	1
UPS	ICA		BESI	APBD	2019	Unit	B	1
Ambal Sembayang	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Set	B	1
Ambal Sembayang	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Set	B	1
Ambal Sembayang	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Set	B	1
Ambal Sembayang	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Set	B	1
Lampu Gantung	Tanpa Merk		KACA	APBD	1999	Set	B	1
Lampu Hias Gantung	Tanpa Merk		KACA	APBD	2000	Set	B	1
Lampu Hias Gantung	Tanpa Merk		KACA	APBD	2000	Set	B	1
Kabel loudloudspeaker	Tanpa Merk		KUNINGAN	APBD	2002	Set	B	1
Kabel Mix Stereo	Tanpa Merk		KUNINGAN	APBD	2002	Set	B	1
Loud Speaker	VS		BESI/BUSA	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker System	X-240 GM		BESI	APBD	2002	Buah	B	1
Speaker Ruangan	TOA		Kayu/Besi	APBD	2012	Unit	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Gorden	Koblen		Kain	APBD	2012	Paket	B	1
Audio Visual/Microphone Wi	JMT		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Audio Visual/Microphone Wi	JMT		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Audio Visual/Conference	JMT		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Audio Visual/Conference	JMT		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Tiang Bendera	Tanpa Merek		Kayu	APBD	2022	Buah	B	1
DVD	Sony K 370		Plastik/besi	APBD	2002	Buah	B	1
ALAT PEMADAM KEBAKARAN								10
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Racun Api	Tiguiser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT								37
MEJA KERJA PEJABAT								25
Meja Rapat Pejabat eselon II	Meja 1 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Kerja Pejabat eselon III	Meja 1/2 Biro		Kayu/Besi	APBD	2022	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	1989	Buah	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Meja Biro	Ligna		Kayu/Kaca	APBD	1995	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		Kayu/Kaca	APBD	1998	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2000	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2000	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Meja Biro	Lokal		KAYU	APBD	2002	Buah	B	1
Meja Biro	1 Biro		KAYU	APBD	2004	Buah	B	1
Meja Biro	1 Biro		KAYU	APBD	2004	Buah	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Meja Biro	Executive		Besi	APBD	2017	unit	B	1
MEJA RAPAT PEJABAT								4
Meja Kursi Tamu	Lokal		Kayu/Busa	APBD	2004	set	B	1
Meja Kursi Tamu	Lokal		Kayu/Busa	APBD	2004	set	B	1
Meja Kursi Tamu	Lokal		Kayu/Busa	APBD	2004	set	B	1
Meja Kursi Tamu	Lokal		Kayu/Busa	APBD	2004	set	B	1
KURSI KERJA PEJABAT								2
Kursi Biro	Tanpa Merk		KAYU	APBD	1997	Buah	B	1
Kursi Biro	Tanpa Merk		KAYU/BUSA	APBD	1999	Buah	B	1
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT								6
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	1999	Buah	B	1
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
Lemari Buku	Lokal		KAYU	APBD	2001	Buah	B	1
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR								154
ALAT STUDIO								121
PERALATAN STUDIO AUDIO								22
Amplifier	TOA		BESI	APBD	1996	Unit	B	1
Amplifier	Aiwa		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
Amplifier	MT/DX 122		Besi/Plastik	APBD	2021	Unit	B	1
Amplifier	TOA		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Amplifier dan soun system	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2008	Paket	KB	1
Power Amplifier	VM 2240		BESI	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	DM 1300		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	DM 1300		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	DM 1300		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	DM 1300		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	DM 1300		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Microphone	Intel		Plastik/besi	APBD	2002	Paket	B	1
Personal Digital	TOA		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Alat Kesenian	SONY		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Alat Kesenian	SONY		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Alat Kesenian	JMT		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Audio Cassette Recorder	ICA		FIBER	APBD	2002	Unit	B	1
Peralatan studio Visual Lain-	TOA		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM								99
Layar OHV	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2002	Unit	B	1
Layar OHV	Tanpa Merk		FIBER	APBD	1996	Unit	B	1
Alat Peraga dan Penayangan I	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Jack Canon	Tanpa Merk		KUNINGAN	APBD	2002	Set	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon L. 110		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaaan Kamera	Nicon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

[illegible]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Pengadaan Telpn Flexy	ZTE, F Home/iw		Plastik/besi	APBD	2013	Unit	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Air Phone	Nasional		Plastik/besi	APBD	2006	Buah	B	1
Facsimile	Panasonic		BESI	APBD	2001	Unit	B	1
Faximile	Panasonic		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Telephone Mobile	Samsung/Tabl et		Plastik	APBD	2022	Unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Telephone Handky Talky	TERIphone TP-889DLX		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Pengadaan Mesin Jilid	WO 40 DLX		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Telepon PABX	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Mesin Jilid	Laminating		Besi	APBD	2012	Unit	B	1
ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF								1
Alat Komunikasi Radio VHF L	Kenwood		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Peralatan Pemancar								1
SUMBER TENAGA								1
Mesin Genset	Perkins		Besi	APBD	2012	Unit	B	1
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN								2
ALAT KEDOKTERAN								2
ALAT KEDOKTERAN UMUM								2
Alat Thermo Gun	SPC TG-05 DV		Plastik	APBD	2020	Buah	B	1
Alat Thermo Gun	SPC TG-05 DV		Plastik	APBD	2020	Buah	B	1
Alat Laboratorium								2
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR								1
INSTRUMENT PROBE/SENSOR								1
Keran Air	Tanpa Merk		Besi/plastik	APBD	2009	Set	B	1
Alat Peraga Praktik Sekolah								1
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN								1
Organ/Sound systems	Korg		Besi/Plastik	APBD	2012	Paket	B	1
Alat Persenjataan								2
Senjata Sinar								2
Senjata Sinar Lainnya								2
PSIC	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Buah	B	1
Pusat Informasi Supral Prom	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2006	Set	B	1
KOMPUTER								298
KOMPUTER UNIT								138
KOMPUTER JARINGAN								5
Peralatan Jaringan Komputer	ASTERIX Router		Kabel/Plastik	APBD	2010	set	B	1
Peralatan Jaringan Komputer	Edgerouter x Router		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Peralatan Jaringan Komputer	Edgerouter x Access Poin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Peralatan Jaringan Komputer	UAP AC Pro Switch		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Peralatan Jaringan Komputer	PoE+16 Port 150 W		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
PERSONAL KOMPUTER								133
Komputer PC	Lacer		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Komputer PC	Pentium IV		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Komputer PC	Pentium IV		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Komputer PC	Toshiba		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Komputer PC	P.4		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Komputer PC	P.4		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Komputer PC	Ion		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Komputer PC	ion		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Komputer PC	Aceer		Plastik/besi	APBD	2007	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Komputer PC	Aceer		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Komputer PC Pentium Dual C	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Komputer PC Pentium Dual C	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	Intel Pentium		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC Compaq	DX 2310 MT		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC Compaq	DX 2310 MT		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Komputer PC	DELL		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Simbadda		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Simbadda		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Simbadda		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Simbadda		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Komputer PC	Linovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Hp. Paviliun		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Hp. Paviliun		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Komputer PC	Hp. Paviliun		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Komputer PC Monitor Touch S	HP. ENVY 23-4245d		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Komputer Pemetaan	Simbada		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Komputer PC	Core i7 envy 700-325d Series		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Komputer PC	Core i7 envy 700-325d Series		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Komputer PC	Core i7 envy 700-325d Series		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Komputer PC	ASUS AIO		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Personal Komputer	HP AIO ProOne 400		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Personal Komputer	HP AIO ProOne 400		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Personal Komputer	HP AIO ProOne 400		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Personal Komputer	HP AIO ProOne 400		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Personal Komputer	HP AIO ProOne 400		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
PC ALL IN ONE	Lenovo Core i7		Besi/Plastik	APBD	2022	Unit	B	1
PC ALL IN ONE	Lenovo Core i7		Besi/Plastik	APBD	2022	Unit	B	1
PC ALL IN ONE	Lenovo Core i7		Besi/Plastik	APBD	2022	Unit	B	1
Laptop dan Infocus	Toshiba		BESI	APBD	2002	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Compaq		BESI	APBD	1996	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Toshiba		Plastik/besi	APBD	2003	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Toshiba		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Acer		Plastik/besi	APBD	2004	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Lokal		Kayu	APBD	2004	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Tosiba		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Acer		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Toshiba		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	2
Note Book/Laptop	Toshiba		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	2
Note Book/Laptop	Acer		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Acer		Plastik/besi	APBD	2006	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Toshiba		Besi	APBD	2007	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2007	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Aceer/Toshiba		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Intel T9400		Besi	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Intel T9400		Besi	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Toshiba		Besi	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Intel Atom N.280		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	DELL		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	DELL Vestro 1200		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Fujitsu Life Book		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Note Book/Laptop	Tosiba Satelit		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Pengadaan Komputer Note B	Sony Vaio		Besi/plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Laptop	Fujitsu/Lenovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Laptop	Fujitsu/Lenovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Laptop	Fujitsu/Lenovo		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Laptop/Note Book	Dell		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Laptop/Note Book	Dell		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Laptop/Note Book	asus		Besi/Plastik	APBD	2013	Buah	B	1
Laptop/Note Book	asus		Besi/Plastik	APBD	2013	Buah	B	1
Laptop/Note Book	asus		Besi/Plastik	APBD	2013	Buah	B	1
Laptop/Note Book	asus		Besi/Plastik	APBD	2013	Buah	B	1
Laptop/Note Book	asus		Besi/Plastik	APBD	2013	Buah	B	1
Pengadaan Laptop Multmedia	DELL Inspiron		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Laptop Pemetaan	Apple MAC Pro		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Notebook	2015		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	2015		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	2015		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	2015		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	2015		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	N550-CM573H		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	PU451LD-W160G		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Notebook	845 LL		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Laptop/Note Book	ASUS A45UR-GA091D		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP Pavilion		Besi	APBD	2018	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP Pavilion		Besi	APBD	2018	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP Pavilion		Besi	APBD	2018	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP Pavilion		Besi	APBD	2018	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP Pavilion		Besi	APBD	2018	unit	B	1
Laptop/Note Book	Del Inspiron 7386		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	Del Inspiron 7386		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	Del Inspiron 7386		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	Del Inspiron 7386		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290-P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290-P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290-P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290- P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290- P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	HP PC Slimlenc 290- P0036D		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	Laptop Grafis core i9 Asus		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Laptop/Note Book	Laptop Pemetaan Core i7		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
PERALATAN KOMPUTER								160
PERALATAN MAINFRAME								6
Personal Computer	Lokal		Plastik/besi	APBD	2003	Set	Hibah	1
Personal Computer (PC)	400,S13d		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Personal Computer (PC)	23Q 121 D		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Personal Computer (PC)	251, 0416		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Personal Komputer	Asus		Plastik	APBD	2021	unit	B	1
Personal Komputer	Asus		Plastik	APBD	2021	unit	B	1
PERALATAN MINI KOMPUTER								4
Pengadaan Scanner	P2 406 Series		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Personal Komputer	Plustek Smart		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	Plustek Smart		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Computing / Scanner	Mini FC		Besi/Plastik	APBD	2020	unit	B	1
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER								144
CPU	Beno		BESI	APBD	1996	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Fortune		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1998	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	1999	Unit	B	1
CPU	E-Machine		BESI	APBD	1999	Unit	B	1
CPU	Mugen		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	GTC		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	GTC		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	Laser		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	SPC		BESI	APBD	2001	Unit	B	1
CPU	Power		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	Acer		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	Beno		BESI	APBD	2000	Unit	B	1
CPU	Acer/Albo		Plat/Besi	APBD	2004	Unit	B	1
CPU	Acer/Albo		Plat/Besi	APBD	2004	Unit	B	1
CPU	Acer/Albo		Plat/Besi	APBD	2004	Unit	B	1
CPU	AIBO		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
CPU	AIBO		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
CPU	AIBO		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
CPU	SIMBADDADA		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
CPU	Intel		Plastik/kaca	APBD	2007	Unit	B	1
Personal Komputer	Apple MacBook Pro		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	HP Pavilion		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	HP All-In-One Pavilion		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	HP 280 G3 SFF		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	HP Designjet T1700		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Monitor	Acer		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Acer		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Acer		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Samsung		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Samsung		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Samsung		Ebonit/Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Monitor	Samsung		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Monitor	Samsung		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Monitor	Laser		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	TRL		Ebonit/Kaca	APBD	2006	Unit	B	1
Monitor	LG		Plastik/besi	APBD	2007	Unit	B	1
Monitor	LG		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Printer Deskjet			FIBER	APBD	1998	Unit	B	1
Printer HP	HP Laser Jet		FIBER	APBD	1998	Unit	B	1
Printer Hawlett	Hawlett Packet		FIBER	APBD	2000	Unit	B	1
Printer HP	HP Desk Jet		FIBER	APBD	2001	Unit	B	1
Printer Hawlett	Hawlett Packet		FIBER	APBD	2001	Unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Printer HP Desk Jet	HP Desk Jet		FIBER	APBD	2001	Unit	B	1
Printer	HP Deskjet		Plastik	APBD	2003	Unit	Hibah	1
Digitizer	Wacom		Plastik	APBD	2003	Unit	Hibah	1
Printer HP	HP		Ebonit/ Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Printer HP	HP		Ebonit/ Kaca	APBD	2004	Unit	B	1
Printer	HP		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Printer	HP		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Printer HP	HP		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Printer HP	HP		Plastik/besi	APBD	2005	Unit	B	1
Printer Epson	Epson		besi	APBD	2007	Unit	B	1
Printer	HP		Plastik/besi	APBD	2008	Unit	B	1
Eksternal Hardisk	250 GB		Besi/plastik	APBD	2009	Buah	B	1
Eksternal Hardisk	250 GB		Besi/plastik	APBD	2009	Buah	B	1
Printer HP	HP		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Printer HP Laserjet	M1120 MFP		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Printer	MX 108		Besi/plastik	APBD	2009	Unit	B	1
Printer	Samsung		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Samsung		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	HP. Laserjet		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Printer	HP. Laserjet		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson LX. 300		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Canon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Canon		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Brother		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Brother		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Brother		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Hardisk Eksternal	Seagate		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Hardisk Eksternal	Seagate		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Hardisk Eksternal	Seagate		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Hardisk Eksternal	Seagate		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Hardisk Eksternal	Seagate		Besi/plastik	APBD	2011	Buah	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Printer	Canon		Besi/Plastik	APBD	2012	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Pengadaan Printer	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Printer Kantor	Epson		Plastik/besi	APBD	2014	Unit	B	1
Printer	Epson L355		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Printer	Epson L355		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Printer	Epson L355		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
Ink tank system printer	L355		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Ink tank system printer	J200		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Ink tank system printer	J200		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Pengadaan Monitor	20 Inch		Plastik/besi	APBD	2015	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L.310		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Brother J-200		Besi	APBD	2017	unit	B	1
Printer	Epson L1300		Plastik/besi	APBD	2018	unit	B	1
Printer	Epson L565		Plastik/besi	APBD	2018	unit	B	1
Printer	UPS		Plastik/besi	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	Printer Epson L6170 Wi-fi		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Personal Komputer	Printer HP Laserjet Pro M402		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Printer Canon	Multifunction Inkjet Pixma		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer Canon	Multifunction Inkjet Pixma		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer Canon	Multifunction Inkjet Pixma		Plastik	APBD	2019	unit	B	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Printer Canon	Multifunction Inkjet Pixma		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer Canon	Multifunction Inkjet Pixma		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	EPSON L6160		Plastik	APBD	2019	unit	B	1
Printer	Epson L4220		Plastik	APBD	2022	Unit	B	1
Printer	Epson Multifungsi		Plastik	APBD	2023	Unit	B	1
Hard Drive 2TB	USB 3.0		Plastik	APBD	2024	Unit	B	1
Hard Drive 2TB	USB 3.0		Plastik	APBD	2024	Unit	B	1
PERALATAN JARINGAN								6
HUB	Panasonic		Plastik/besi	APBD	2005	set	B	1
Mainframe/Server	Tanpa Merk		Plastik/besi	APBD	2005	Paket	B	1
SWITCH HUB	MAITUO		Ebonit	APBD	2006	set	B	1
Komputer Mainframe Server	IBMX 3650 N2 32A		Besi/plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Kelengkapan Komputer	Plastik/Kabel		Plastik	APBD	2010	Unit	B	1
Server	DELL EMG		Besi/plastik	APBD	2024	Paket	B	1
Alat Keselamatan Kerja								20
Alat Kerja Penerbangan								20
ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK								20
Pengadaan GPS	Garmin		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan GPS	Garmin		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan GPS	Garmin		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan GPS	Garmin		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan GPS	Garmin		Plastik	APBD	2011	Unit	B	1
Pengadaan Citra Satelit	Tanpa Merek		CD	APBD	2011	Paket	B	1
Pengadaan Server GIS	IBM		Server	APBD	2011	Paket	B	1
Pengadaan GPS	Eregon		Plastik/besi	APBD	2013	Buah	B	1
Pengadaan GPS	Eregon		Plastik/besi	APBD	2013	Buah	B	1
Pengadaan GPS	Eregon		Plastik/besi	APBD	2013	Buah	B	1
Pengadaan GPS	Eregon		Plastik/besi	APBD	2013	Buah	B	1
Pengadaan GPS	Eregon		Plastik/besi	APBD	2013	Buah	B	1
GPS	MAP - 62S		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
GPS	MAP - 62S		Plastik/besi	APBD	2015	buah	B	1
GPS Geo Genetik Hi Target	Garmin 78S		Besi	APBD	2017	unit	B	1
GPS	Garmin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
GPS	Garmin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
GPS	Garmin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
GPS	Garmin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
GPS	Garmin		Besi	APBD	2017	unit	B	1
BANGUNAN GEDUNG								3
BANGUNAN GEDUNG								
TEMPAT KERJA								
Bangunan Gedung Kantor								3
Gedung I			Beton	APBD	2006	Unit	B	1
Rehab Gedung I 2016 Interior			Interior	APBD	2016	Unit	B	
Rehab Gedung I 2017 :			Lokal	APBD	2017	Paket	B	
Rehab Gedung I 2018 :			Lokal	APBD	2018	Paket	B	
- Pengadaan Kanopi Parkir Mobil								
- Renovasi Interior Ruang PRK								
- Rehab Atap dan Kanopi			Lokal	APBD	2018	Paket	B	
Rehab Gedung I 2019 BAPPEDA :			Lokal	APBD	2019	Paket	B	
Rehab Gedung I 2019 PUPR :			Lokal	APBD	2019	Paket	B	
Gedung II			Beton	APBD	2006	Unit	B	
Rehab Gedung II			Lokal	APBD	2021	Paket	B	1
Gedung III			Beton	APBD	2009	Unit	B	1
BANGUNAN AIR								9
Bangunan Air								2
Bangunan Air Irigasi								2
Bangunan Pengambilan Irigasi								2
Sumur Bor Dalam	Lokal Kantor		Plastik	APBD	2018	unit	B	1
Instalasi Jaringan Pipa Air Ka	Bappeda		Pipa/Lem	APBD	2014	Paket	B	1
INSTALASI								1
INSTALASI LAIN								1
INSTALASI LAIN								1
Jaringan Komputer	Kantor Bappeda		Kabel	APBD	2002	Paket	B	1
JARINGAN								6
JARINGAN LISTRIK								4
Jaringan Transmisi								3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Unit Roof Solar Panel	Tenaga Surya		Besi/Viber	APBD	2019	unit	B	1
Unit Roof Solar Panel	Tenaga Surya		Besi/Viber	APBD	2019	unit	B	1
Jaringan Listrik	Kantor		Besi	APBD	2009	Paket	B	1
Jaringan Listrik Lainnya								1
Instalasi Listrik Kantor	Kantor		Kabel	APBD	2013	Paket	B	1
JARINGAN TELEPON								2
Jaringan Telepon Diatas Tanah								2
Jaringan	transmisi		Kabel	APBD	2007	Paket	B	1
Jaringan	telepon diatas tanah		Kabel	APBD	2008	Paket	B	1
								18
BAHAN PERPUSTAKAAN								18
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK								18
Buku Umum								9
Buku Perpustakaan	Buku Manajemen		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Komputer		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Ilmu Pengetahuan		Kertas	APBD	2004	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Ilmu Pengetahuan		Kertas	APBD	2006	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan		Kertas	APBD	2007	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan		Kertas	APBD	2008	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Pengetahuan Umum		Kertas	APBD	2009	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan		Kertas	APBD	2010	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Perundang-Undangan		Kertas	APBD	2009	Buah	B	1
								7
Buku Ilmu Sosial								7
Buku Perpustakaan	Buku Pemasalahan Sosial		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Politik		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Ekonomi		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Hukum		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Administrasi		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Pendidikan		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
Buku Perpustakaan	Buku Perdagangan		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
								1
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis								1
Buku Perpustakaan	Buku Teknik		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
								1
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah								1
Buku Perpustakaan	Buku Sejarah		Kertas	APBD	1998	Buah	B	1
								9,00
SOFTWARE								4
Aplikasi	E-Office Surat Menyurat		Software /CD	APBD	2019	Unit	B	1
Aplikasi	e-SAKIP, e-RAPOR, e-LKPJ		Software /CD	APBD	2019	unit	B	1
Aplikasi	e-ROPK		Software /CD	APBD	2019	unit	B	1
Aplikasi	e-Pidato		Software /CD	APBD	2020	unit	B	1
ASET RUSAK BERAT/USANG								5
Sepeda Motor Suzuki RC 100	BH 7133 AZ	RC100.224643	Besi	APBD	1991	Unit	RB	1
Sepeda Motor Suzuki A 100	BH 5836 AZ		Besi	APBD	1992	Unit	RB	1
Sepeda Motor Suzuki A 100	BH 5018 AZ		Besi	APBD	1992	Unit	RB	1
Sepeda Motor Suzuki RC 100	BH 7620 AZ		Besi	APBD	1993	Unit	RB	1
Sepeda Motor Suzuki RC 100	BH 7621 AZ		Besi	APBD	1999	Unit	RB	1

1.6. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tahun 2023, telah melaksanakan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Menyusun Perjanjian Kinerja Dengan Indikator Kinerja Yang Smart Untuk Seluruh Pegawai.	Telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kinerja secara berjenjang dari level pimpinan sampai level pelaksana.	Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Khususnya Sasaran Kinerja "Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi" Dengan Indikator -Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah.	Telah di tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Individu (IKI) masing-masing pegawai dengan mengacu pada <i>cascading</i> IKU (RPJMD), Indikator Sasaran (Renstra PD), dan Indikator Program (Renja-PD). Dan peningkatan penambahan personal jabatan Fungsional baik stingkat Madya maupun Muda serta Pratama.	Seluruh Kepala Bidang dan Sekretariat Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.
3	Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang Oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas	Untuk tahun 2024 Monev Rencana Aksi Renja untuk Triwulan 1,2,3 dan 4 telah dilaksanakan menggunakan Aplikasi E-Paket. Lalu kemudian Bahan evaluasi kinerja telah dijadikan sebagai dasar dalam menyusun IKI sesuai format yang ada, sehingga kinerja masingmasing individu/ASN dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berjalan efektif dan efisien.	Seluruh Kepala Bidang dan Sekretariat Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.
4	Agar Lebih Cermat Dalam Menyajikan Capaian Kinerja.	Telah ditindaklanjuti dengan dengan aktifnya kembali website Bappeda, dan Instagram Bappeda Provinsi Jambi yang telah memuat berbagai informasi kegiatan agenda dan capaian kinerja pembangunan daerah, dan publikasi laporan kinerja sebagai informasi publik.	Seluruh Kepala Bidang dan Sekretariat Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja dari Inspektorat Prov.Jambi Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda refocusing atau rasionalisasi anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan penggunaan anggaran yang berjalan, serta perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan semua sektor baik Kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup

Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka pada Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada Bab IV hanya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dimuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah ***“VISI Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAh SWT”***.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan kesatu pada misi kesatu RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Berkualitas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1) Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi.

Tujuan yang akan dicapai selama periode Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah *“Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif”*.

2) Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

- a. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bappeda Provinsi Jambi juga telah menetapkan indikator kinerja masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah
			Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RCPD
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya
			Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial
			Persentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD
		2. Meningkatkan akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu
			Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah

Tabel. 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun ke 2021	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Keselarasn Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi	85%	85 %	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2	Akutanbilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif.	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah Dengan Menyelenggarakan Forum Musrenbangda, Forum SKPD, FGD dan Konsultasi Publik Yang Menjadi SaranaPenyelerasan Rencana Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan dan Sinergitas Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah.
	Meningkatkan Akutanbilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi.	Peningkatan Kualitas Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dengan Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan serta <i>Review</i> Terhadap Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan dalam RPJMD.	Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan data diatas, Bappeda Provinsi Jambi menyusun strategi dan arah kebijakan guna mecapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi Bappeda Provinsi Jambi berfokus pada peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dan peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Sedangkan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jambi berfokus pada peningkatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka perlu ditetapkan strategi pencapaian yang akan dilaksanakan. Tahun 2024, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, Bappeda Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinergitas perencanaan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan;
- 2) Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan serta dengan stakeholder lainnya;
- 3) Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Mengintegrasikan aspek Ruang dan Wilayah dalam perencanaan pembangunan berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033;
- 5) Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan;
- 6) Mengoptimalkan dokumen evaluasi pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
- 7) Meningkatkan profesionalisme aparatur Bappeda melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sarana dan prasarana.
- 8) Mengoperasionalkan peran Bappeda sebagai wali data tingkat provinsi dalam mendukung kebijakan *One Maps Policy*.
- 9) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- 10) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 11) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 12) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 13) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 14) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 15) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN
					2024
Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	%	98%
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	%	96%
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	%	95%
			Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RPKD	%	100%
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	%	100%
			Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektorial dengan rencana spasial	%	100%
			Persentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	%	78%
		2. Meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	BB
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	%	100%
			Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah	%	40%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada RENSTRA, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah dapat dilihat pada 2 (dua) tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	98%
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	96%
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	95%
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPDP	100%
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	100%
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	100%
		Persentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	78%
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	100%
		Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah	40%

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 30.650.673.090,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 program dengan 13 kegiatan serta 47 subkegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	18.179.719.711,-
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	3.462.059.200,-
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	8.208.208.276,-

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

Sasaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Mengacu pada telaah Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka dengan memperhatikan hasil analisis dan mempertimbangkan isu-isu strategis penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi, selain itu juga sebagai upaya untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi 1, yaitu : ***“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan”***.
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;
3. Memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : *“Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif”.*

Indikator Tujuan : “ Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan”.

Kemudian ada 2 (dua) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD;
- b. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;
- c. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD;
- d. Persentase Konsistensi Program RPJMD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana tahun sebelumnya;
- f. Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan Rencana Spasial;
- g. Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kapasitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi.**

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Predikat AKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu;
- c. Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran serta indikatornya Masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Tahun 2021-2026.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan				B	B	BB	BB	BB
			1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	%	98%	98%	98%	98%	98%
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	%	96%	96%	96%	96%	96%
				persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	%	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	%	100%	100%	100%	100%	100%
				Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	%	70%	75%	78%	80%	85%
			2. Meningkatnya akutanbilas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	BB	BB	A
				Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
				Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah	%	30%	35%	40%	40%	45%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja, sasaran strategis, indikator kinerja, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024(%)	REALISASI 2023(%)	REALISASI KINERJA 2024(%)	CAPAIAN KINERJA 2024 %
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD	98	98,95	98	99,03
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD	96	99,27	96	96,7
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah	95	99,78	95	95,20
	Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	100	97,27	100	102,8
	Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	100	96,92	100	103,1
	Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial.	100	100	100	100
	Persentase Keterisian Data Dan Rencana Dalam SIPD.	78	91,54	78	85,20
Meningkatnya Akutanabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi .	Predikat Akip Perangkat Daerah.	BB	A	-	-
	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan Dan Tepat Waktu.	100	100	100	100
	Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah.	40	30	11,64	38,8

Sumber : Data di Olah (Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024).

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi) adalah dengan predikat sangat baik (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi) dengan predikat sangat baik (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda secara rata-rata adalah sangat baik (100%).

Perbandingan target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi selama periode Tahun 2023–2026 seperti yang digambarkan pada tabel 3.4 dibawah ini menunjukkan bahwa hasil yang baik yaitu dengan capaian masing-masing indikator adalah 100%.

Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					
				2023	2024	2024	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
		persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	%	70%	70%	75%	78%	80%	85%
2	Meningkatnya Akutanbilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	BB	BB	A
		Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah	%	30%	30%	35%	40%	40%	45%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Periode Renstra 2021-2026, yaitu :

Tujuan :

“Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif “

Guna mewujudkan misi 1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT, Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan menetapkan tujuan yaitu ***memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif.*** Melalui tujuan tersebut diharapkan tersedianya dokumen perencanaan daerah yang valid sehingga dapat memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah yang memberikan dampak terhadap stabilitas makro ekonomi. Pencapaian tujuan pertama ini dapat dilihat dari target realisasi indikatornya sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Target Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Realisasi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD.	98%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Dilihat dari target realisasi indikator kinerja diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah terpenuhi. Hal ini diketahui dari capaian indikator kinerja tujuan yaitu Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD dengan realisasi 100%.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA KESELARASAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG INTEGRATIF DAN AKUTANBEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
----------------------------	--

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, bisa dipertanggungjawabkan, maka sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang diukur melalui indikator ***Persentase keselarasan dokumen perencanaan*** pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD, dengan target setiap tahunnya adalah 100%. Target ini ditetapkan atas dasar bahwa dokumen perencanaan secara berjenjang harus terjaga kekonsistennannya agar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang ada di Provinsi Jambi. Kesesuaian antar dokumen perencanaan ini dilihat dari :

- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra.
- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja.
- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD.
- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Penghitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen. Kesesuaian ini dilihat dari : a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD. d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	Total Persentase Kesesuaian Sasarandan Indikator Sasaran antara berbagai dokumen (point a-d) = 4

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Maka, untuk itu **Pencapaian Kinerja Realisasi Indikator Sasaran** tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan indikator sasaran pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. PERSENTASE KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN RPJMD.

Capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang pertama Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD	98	98,95	98	99,03	98

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD, sudah sama dengan target Renstra yaitu sebesar 98% sedangkan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 98%.

Adapun untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD didukung anggaran biaya yang tertera pada program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran Kesatu.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.911.121.276	-40.000.000	3.871.121.276	3.745.856.772	96,76%	98,86	125.264.504
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	507.890.280	0	507.890.280	482.614.360	95,02%	95,02	25.275.920
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	608.000.000	-40.000.000	568.000.000	560.966.467	98,76%	100,00	7.033.533
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	668.700.000	0	668.700.000	655.810.236	98,07%	100,00	12.889.764
4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	788.363.996	0	788.363.996	769.437.377	97,60%	97,60	18.926.619
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	720.167.000	0	720.167.000	687.737.781	95,50%	100,00	32.429.219
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	618.000.000	0	618.000.000	589.290.551	95,35%	100,00	28.709.449

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 125.264.504,- dari jumlah anggaran yang tersedia.

Pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), ada beberapa **output** penting yang dihasilkan pada bidang ini, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD_KSB) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
2. Review dan Analisis Ekonomi Bulanan Provinsi Jambi, Pembahasan Pengembangan Danau Sipin, Monitoring dan Evaluasi Capaian DUMISAKE Bidang PSDA, Asistensi Mitra OPD lingkup Bidang PSDA terkait Capaian IKU dan IKD RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
3. Meningkatkan kapasitas para pihak terkait Program Penurunan Emisi Provinsi Jambi
4. Terbitnya/ perbaikan kebijakan pemerintah provinsi jambi terkait pengelolaan HCV/HCS. ISPO dan karhutla
5. Tersosialisasinya skema BSP Program Penurunan Emisi Provinsi Jambi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Draft Peraturan Kepala Daerah terkait Penerimaan Manfaat fase BSP Program Penurunan Emisi Provinsi Jambi
7. Meningkatnya kapasitas calon penerima manfaat Fase Result Based Payment dalam menyusun usulan proposal kegiatan.
8. Draft Usulan proposal kegiatan penggunaan dan RBP Program Penurunan Emisi Provinsi Jambi
5. Daftar Best Practices dan kegiatan CSR yang dapat mendukung Program Penurunan Emisi di Provinsi Jambi
9. Terintegrasinya Portal Forum CSR Provinsi Jambi Program Penurunan Emisi di Provinsi Jambi dengan Portal BioCF ISFL.
10. Tinggi nya capaian output dan serapan anggaran TA. 2024 terkait Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi.

Pemprov Jambi dorong Kabupaten/Kota untuk Optimalisasi DBH Kelapa Sawit

Berita Utama

Dr. Auri Adham Putro, S.Sos, M.Si 19 Jul 2024 650



Pemprov Jambi tunggu jadwal penandatanganan ERPA program BioCF ISFL

© Rabu, 14 Agustus 2024 20:23 WIB



Pemerintah Provinsi Jambi bersama NGO sharing learning mitigasi perubahan iklim melalui program BIOCF ISFL, Rabu (14/8/2024). (ANTARA/Tuyani)

2. PERSENTASE KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN RPJMD.

Capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **kedua** Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD	96	99,27	96	96,7	96

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD, target Renstra yaitu sebesar 96%, sedangkan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 96%. Dalam hal ini untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD didukung anggaran biaya yang tertera pada program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kedua.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.367.920.000	150.000.000	1.517.920.000	1.462.834.525	96,37%	96,71	55.085.475
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.424.000	0	71.424.000	52.053.656	72,88%	73,65	19.370.344
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	843.997.000	-50.000.000	793.997.000	789.399.298	99,42%	100	4.597.702
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.048.000	0	50.048.000	47.774.500	95,46%	95,46%	2.273.500
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.216.000	0	121.216.000	108.250.979	89,30%	89,30%	12.965.021
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	231.073.000	0	231.073.000	220.970.982	95,63%	95,63%	10.102.018
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.162.000	200.000.000	250.162.000	244.385.110	97,69%	97,69%	5.776.890

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.085.475,- dari jumlah anggaran yang tersedia.

Pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM), ada beberapa **output** penting yang dihasilkan pada bidang ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Acara Rapat Pra penilaian kinerja upaya percepatan penyusunan stunting Kab/kota Se Provinsi Jambi
- 2) Pelaksanaan Acara Rapat Penyempurnaan RANHIR Renja Perangkat Daerah Usulan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 3) Pelaksanaan Acara Rapat Pembahasan dan Finalisasi SIPD-RI
- 4) Pelaksanaan Acara Rapat penilaian kinerja upaya percepatan penyusunan stunting Kab/kota Se Provinsi Jambi
- 5) Pelaksanaan Acara Rapat Perencanaan Program Strategis dalam Pensasaran Percepatan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jambi
- 6) Pelaksanaan Acara FGD Sub Kegiatan Penghapusan Kemiskinan
- 7) Pelaksanaan Acara RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTA PROV JAMBI 2024 4 JULI 2024.
- 8) Pelaksanaan Rapat Evaluasi POKJA Pengarusutamaan Gender PUG Provinsi Jambi
- 9) Pelaksanaan Rapat Sosialisasi SE Gub Jambi No. 1813/SE/Bappeda-3/VII/2022 tentang dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan STUNTING di Provinsi Jambi tahap 1
- 10) Pelaksanaan Rapat Sosialisasi SE Gub Jambi No. 1813/SE/Bappeda-3/VII/2022 tentang dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan STUNTING di Provinsi Jambi tahap 2.
- 11) Pelaksanaan Rapat Pembinaan Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan STUNTING di Tingkat Kabupaten/Kota
- 12) Pelaksanaan Rapat persiapan B12 Aksi HAM Provinsi Jambi
- 13) Pelaksanaan Rapat FGD Penyampaian Matrik pemetaan percepatan penghapusan kemiskinan (PPKE) TW III dan Program kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 melalui APBD dan APBN.
- 14) Pelaksanaan Rapat koordinasi Persiapan penilaian Kabupaten/Kota sehat di Provinsi Jambi tahun 2025
- 15) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi isu kewilayahan kesejahteraan sosial Provinsi Jambi
- 16) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hasil RANHAM Kabupaten /Kota Se – Provinsi Jambi Tahun 2024
- 17) Pelaksanaan Rapat Sosialisasi SE Gub Jambi no. 213/SE/Bappeda-3/II/2023 Tentang Dukungan Optimalisasi Pelaksanaan Surveilans Gizi Dalam Percepatan Penurunan STUNTING di Provinsi Jambi.
- 18) Pelaksanaan Rapat Percepatan Pencapaian Target Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jambi

- 19) Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Laporan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Merangin
- 20) Pelaksanaan Rapat Percepatan Penyusunan PAUD HI Provinsi Jambi
- 21) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penentuan Sub Kegiatan Tagging STUNTING Untuk Realisasi Pelaksanaan Insentif FISKAL Penurunan STUNTING Tahun 2024
- 22) Pelaksanaan Rapat persiapan BO8 Aksi HAM Provinsi Jambi.



Gambar 3.1 Rapat Pembahasan Perkembangan Stunting Provinsi Jambi Tahun 2024.

3. PERSENTASE KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN.

Untuk capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketiga** yaitu Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	99,78	95	95,20	95

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sudah melebihi target Renstra, yaitu sebesar 98,78% sedangkan target Renstra hanya sebesar 95%. Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketiga.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.016.287.000	-50.040.000	2.966.247.000	2.936.921.303	99,01%	98,78	29.325.697
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.160.000	0	5.160.000	4.880.000	94,57%	48,06	280.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	218.280.000	-25.730.000	192.550.000	188.421.500	97,86%	100	4.128.500
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.570.000	-19.290.000	9.280.000	9.280.000	100,00%	0,00	0
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	110.740.000	-5.020.000	105.720.000	104.788.772	99,12%	99,12	931.228
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000	0	300.000.000	298.825.905	99,61%	100	1.174.095
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.380.915.176	98,64%	98,64	19.084.824
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.450.000	0	6.450.000	6.450.000	100,00%	33,33	0
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	947.087.000	0	947.087.000	943.359.950	99,61%	100	3.727.050

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.325.697,- dari jumlah anggaran yang tersedia. Pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah, ada beberapa **output** penting yang dihasilkan pada bidang ini, sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
4. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Dokumen Roadmap Kebijakan Satu Peta Provinsi Jambi.
5. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah (Dokumen Sentusa, Dokumen Kawasan Pedesaan Pemenang, Dokumen Kawasan Pedesaan Tabir).
6. Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah.
7. Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah (Laporan Implementasi Penuh Sistem MAR Jambi).



Gambar 3.1 Rapat Pembahasan Kawasan Ekonomi SENTUSA Tahun 2024.

4. PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD).

Pada capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **keempat** yaitu Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 ; Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	100	97,27	100	102,8	100

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Memenuhi target Renstra, yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebesar 100%. Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran keempat.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.661.881.200	-20.071.000	2.641.810.200	1.984.686.936	75,13%	77,02	657.123.264
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	738.789.400	-50.000	738.739.400	578.838.318	78,35%	85,13	159.901.082
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.413.500	0	40.413.500	29.223.000	72,31%	72,31	11.190.500
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	89.967.400	0	89.967.400	33.723.400	37,48%	37,48	56.244.000
4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	671.200.400	-20.000.000	651.200.400	601.389.077	92,35%	92,35	49.811.323
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.121.510.500	-21.000	1.121.489.500	741.513.141	66,12%	66,12	379.976.359

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 657.123.264,- dari jumlah anggaran yang tersedia, yaitu sebesar Rp.2.661.881.200,- Pada indikator sasaran Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ada beberapa **output** penting yang dihasilkan pada bidang dan subbidang ini, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Jambi.
2. Konsultasi Publik atas Perencanaan Pembangunan Tahun 2025.
3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Untuk Tahun 2025.



Gambar 3.1 Konsultasi Publik dan Musrenbang Tahun 2024.

5. PERSENTASE KESELARASAN RENCANA TAHUNAN DENGAN HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA TAHUN SEBELUMNYA.

Pada capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **kelima** yaitu Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	100	96,92	100	103,1	100

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, memenuhi target Renstra, yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebesar 100%.

Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta didukung oleh beberapa subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16, Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kelima.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	500.091.000	-15.003.640	485.087.360	418.963.598	86,37%	86,37	66.123.762
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	484.545.000	-15.003.640	469.541.360	405.608.598	86,38%	86,38	63.932.762
2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.546.000	0	15.546.000	13.355.000	85,91%	85,91	2.191.000

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.123.762,- dari jumlah anggaran yang tersedia, yaitu sebesar Rp.485.087.360,- Pada indikator Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ada beberapa **output** penting yang dihasilkan pada bidang dan sub bidang ini, adalah Khusus pada fokus kegiatan adalah monitoring kegiatan kelapangan dan kegiatan Tim Ahli Gubernur (TAG), yang mana tim ini mempunyai tugas penting adalah membantu kinerja Gubernur secara keseluruhan melalui pendampingan ke setiap perangkat daerah yang ada di Provinsi Jambi.



Jambi, 1 Agustus 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi bersama dengan Tim Ahli Gubernur Jambi (TAG), Bapak Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H.,M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi; Bapak Ir. Syahrasadin, M.S.i Ketua Harian Tenaga Harian Gubernur Jambi; Bapak Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H; Bapak Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terhadap RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.



OPINI DAERAH

Gubernur Al Haris : Memimpin Jambi Menuju Keberlanjutan Gambut Nasional

8 Mei 2024 penengah 0 Komentar

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
(Tenaga Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia)

Penghargaan atas komitmen dan kepemimpinan luar biasa dalam menjadikan Provinsi Jambi sebagai pusat referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional diterima oleh Gubernur Jambi, Al Haris dari Badan Restorasi Mangrove Gambut (BRGM). Penyerahan penghargaan ini dilakukan langsung oleh Kepala BRGM, Ir. Hartono, M.Si., kepada Gubernur Al Haris.

Sumber : Dokumen Bappeda bidang PPED Tahun 2024.

6. PERSENTASE KESELARASAN DOKUMEN RENCANA SEKTORAL DENGAN RENCANA SPASIAL.

Indikator capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **keenam** yaitu Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024,
Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial.	100	100	100	100	100

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, dapat dikategorikan memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebesar 100%, tidak ada perbedaan dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta didukung oleh beberapa subkegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang
Indikator Sasaran keenam.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.121.510.500	-21.000	1.121.489.500	741.513.141	66,12%	66,12	379.976.359
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.121.510.500	-21.000	1.121.489.500	741.513.141	66,12%	66,12	379.976.359

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk satu program terdapat satu kegiatan dan satu subkegiatan yaitu subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, lalu untuk anggaran biaya pada satu kegiatan dimaksud dengan total nilai pada anggaran sebesar Rp.1.121.489.500,- lalu pada subkegiatan ini serapan anggaran hanya mencapai 66.12% jauh dari target Renstra, kemudian pada subkegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.379.976.359,- dari jumlah anggaran biaya yang tersedia.

Fokus dari kegiatan ini adalah bagaimana ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah, kesesuaian antar dokumen dengan target 100% dan dengan harapan bisa terealisasi 100%, sumber data diolah dari hasil verifikasi yang dilakukan terhadap Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024. Pada indikator Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektorial Dengan Rencana Spasial ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ada beberapa **output** adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, dan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 4 dokumen.





Sumber : Dokumen Bappeda bidang PPED Tahun 2024.

7. PRESENTASE KETERISIAN DATA DAN RENCANA DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD).

Pada sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketujuh** yaitu Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), target-target yang telah dirancang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	78	91,54	78	85,20	78

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SUDAH memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 78% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 hanya sebesar 78%. Dan untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH. Pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta didukung oleh dua subkegiatan dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20, Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketujuh.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	250.050.000	14.000	250.064.000	177.184.014	70,86%	85,96	72.879.986
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	105.310.000	-5.830.000	99.480.000	83.652.248	84,09%	84,09	15.827.752
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	88.280.000	0	88.280.000	75.802.739	85,87%	85,87	12.477.261
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	56.460.000	5.844.000	62.304.000	17.729.027	28,46%	89,09	44.574.973

Sumber : Data diolah dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk satu program terdapat satu kegiatan dan tiga subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk satu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.250.064.000,- pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serapan anggaran adalah sebesar 70,86%. Kemudian pada tiga subkegiatan tersebut terdapat silpa atau sisa anggaran bisa juga disebut dengan efisiensi anggaran dengan jumlah sebesar Rp.72.879.986 dari jumlah anggaran yang tersedia.

Pada indikator Sasaran Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini, secara pembagian bidang di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kemendagri Dorong Pemprov Jambi Optimalkan Penggunaan SIPD RI

© 24/01/2024



Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, SIPD RI merupakan satu-satunya aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan evaluasi. SIPD RI digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mendukung percepatan transformasi digital.

Recent Posts

- Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data, Ditjen Bina Adwil Percepat Penyusunan Kepmendagri
- Wamendagri Ribka Nilai Menteri Maruarar sebagai Berkat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Miliki Rumah
- Tinjau Mal Pelayanan Publik Kota Makassar, Wamendagri Bima Apresiasi Integrasi Berbagai Layanan
- Wamendagri Bima Arya Dukung Peran Aktif Penyuluh Pertanian dalam Program Irigasi
- Irigasi Malunda Sulbar Miliki Potensi yang Signifikan Dukung Swasembada Pangan
- Shamika Calcagni on Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Terpenuhi, Mendagri Dorong Pemda Aceh Percepat Penandatanganan NPHD



Gambar : Kegiatan Di Bidang PPED terkait dengan SIPD

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang baik dan **SMART** antara lain :

1. Optimalisasi Proses Perencanaan Melalui :

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024, melalui :
 - ✓ Melaksanakan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 tepat waktu, telah dilaksanakan pada awal tahun 2024.
 - ✓ Menghadirkan berbagai element dan unsur masyarakat yang aktif memberikan saran, pandangan dan masukan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang disusun.
 - ✓ Pelaksanaan diselenggarakan secara offline dan online melalui media zoom meeting dan canal Youtube agar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang RPJMD Tahun 2021-2026
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025
- d. Melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2025.

2. Meningkatkan Kesesuaian, Kekonsistenan Dan Sinergitas Antar Dokumen Perencanaan, Melalui :

- a. Penggunaan Aplikasi E-Paket dimulai tahun 2024.
- b. Orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi Perangkat Daerah terkait dengan kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra.

- c. Melaksanakan orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi dalam Penyusunan sasaran dan indikator sasaran dalam RPJMD dengan Penyusunan *Cascading* untuk Laporan Akuntabilitas bersama OPD.
 - d. Melakukan verifikasi data IKU, IKD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD melalui perumusan definisi operasional, rumusan masing-masing indikator dan kegunaan indikator dalam rangka menjaga keakuratan data yang disajikan dalam dokumen perencanaan.
 - e. Melegalformalkan perumusan definisi operasional, rumus masing-masing indikator dan kegunaan indikator melalui Peraturan Gubernur.
 - f. Melakukan percepatan persiapan penyusunan dokumen Renja dan RKPD Tahun 2024 pada triwulan IV Tahun 2024 guna menjaga kekonsistenan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - g. Melakukan *kick off* penyusunan RKPD 2025 dengan tujuan untuk lebih bisa melakukan penajaman-penajaman dalam penyusunan Renja dan RKPD.
 - h. Meningkatkan kualitas pelaksanaan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - i. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota.
3. **Melakukan Pengembangan Aplikasi *E-Paket*, *E-Planing* Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.**
 4. **Melakukan perbaikan/revisi terhadap indikator kinerja, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa kerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dengan indikator kinerja yang lebih *SMART* dan mudah diukur.**

Dalam pencapaian keberhasilan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi juga ditemukan beberapa **kendala dan faktor penghambat**, antara lain :

1. Masih banyak OPD yang belum memahami tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam hal ini, strategi perbaikan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, salah satunya melalui sosialisasi Kalender Perencanaan.
2. Hasil verifikasi terhadap dokumen rencana kerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi akan memberikan *punishment* kepada Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil verifikasi serta meningkatkan kinerja internal melalui peningkatan *monev* dalam penyusunan dokumen perencanaan.

3. Pemahaman OPD terhadap kebutuhan data dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terbatas. Dalam hal ini strategi perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD serta mengoptimalkan Forum Satu Data Indonesia.

SASARAN STRATEGIS II	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KAPABILITAS INSTANSI BAPPEDA PROVINSI JAMBI
-----------------------------	---

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi yang diselaraskan dengan **Manajemen Tata Kelola Organisasi** yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara *internal* maupun secara *eksternal*.

Untuk melihat keberhasilan tata kelola organisasi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis yaitu ***Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi***. Gambaran pencapaian sasaran strategis ini pada Bappeda Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui 3 (tiga) indikator adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR SASARAN PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH.

Untuk capaian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, maka dikuatkan pada indikator sasaran yang **pertama** yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	BB	A	- Nilai LAKIP Prov. Jambi Belum Dinilai, Di Nilai Pada Tahun 2025	-	BB

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada realisasi tahun 2023 mendapat nilai A dengan presentase angka 81,50%.

Sementara target Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 hanya Huruf “BB”, namun dalam hal ini realisasi yang diharapkan untuk nilai AKIP pada tahun 2024 bisa mencapai 100%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, satu kegiatan dan empat subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22 Program/Kegiatan/Subkegiatan
Penunjang Indikator Sasaran Kesatu Pada Sasaran Strategis Kedua.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi	% Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah	Anggaran Belanja	Keuangan	Fisik	
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	589.423.388	20.500.000	609.923.388	577.552.200	94,69%	96,95	32.371.188
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.472.370	0	40.472.370	40.281.364	99,53%	100,00	191.006
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	51.997.892	0	51.997.892	33.647.327	64,71%	64,71	18.350.565
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.000.000	0	320.000.000	306.430.459	95,76%	100,00	13.569.541
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.953.126	20.500.000	197.453.126	197.192.750	99,87%	99,87	260.376

Sumber : Data Diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk satu program dan terdapat satu kegiatan serta terdapat empat sub-kegiatan, kemudian anggaran biaya untuk satu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.609.923.388,- lalu pada pada semua sub-kegiatan dianggap memenuhi target Renstra. Kemudian pada semua sub-kegiatan tersebut terdapat efisiensi atau sisa anggaran dengan jumlah sebesar Rp.32.371.188,- realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.577.552.200,- maka secara harapannya adalah realisasi nilai AKIP pada tahun 2024 melebihi nilai yang ada pada tahun sebelumnya.

Pada indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah ini, secara pembagian Tugas dan Fungsi (TUSI) di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi, tepatnya pada Sub Bagian Program, yang menghasilkan beberapa **OUTPUT** penting demi berjalannya roda organisasi di Bappeda Provinsi Jambi, yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja Tahun 2025
- 2) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
- 3) APBD Murni Tahun Anggaran 2025
- 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJ) Tahun 2024
- 5) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
- 6) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Tahun 2024
- 7) Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 8) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 9) DPA Murni 2024, DPA Perubahan 2024, RKA 2025, DPA 2025.
- 10) Melaksanakan Laporan Capaian Pertriwulan.



Gambar : Rapat-rapat yang dilaksanakan pada Subbag Program Tahun 2024.

2. INDIKATOR SASARAN PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DIPUBLIKASIKAN DAN TEPAT WAKTU.

Untuk capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, didorong dan dikuatkan pada indikator sasaran yang **kedua** yakni Indikator Sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu.	100	100	100	100	100

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Indikator Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu pada realisasi tahun 2024 dengan presentase angka sebesar 100%, sementara target Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 adalah 100%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu dengan didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, dua kegiatan dan lima subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24

Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Kedua Pada Sasaran Strategis Kedua.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.713.769.146	750.725.903	14.464.495.049	13.149.842.947	90,91%	90,91%	1.314.652.102
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.529.369.146	750.725.903	14.280.095.049	13.020.862.947	91,18%	91,18%	1.259.232.102
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.400.000	0	184.400.000	128.980.000	69,95%	69,95%	55.420.000

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.233.717.217	-84.195.360	1.149.521.857	970.716.991	84,45%	84,45%	178.804.866
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.124.000	-50.139.000	212.985.000	171.342.500	80,45%	80,45%	41.642.500
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.430.000	0	105.430.000	74.840.000	70,99%	70,99%	30.590.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	865.163.217	-34.056.360	831.106.857	724.534.491	87,18%	87,18%	106.572.366

Sumber : Data Diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI terdapat dua kegiatan dan lima subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk dua kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.15.614.016.906,- sudah termasuk gaji dan tunjangan, pada dua kegiatan tersebut realisasi keuangan adalah sebesar Rp.14.120.559.938,- dengan persentase sebesar 90,91% Dari dua subkegiatan dimaksud terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.1.493.456.968,- yang dikembalikan ke kas daerah Provinsi Jambi.

Pada indikator Sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu, secara pembagian Tugas dan Fungsi (TUSI) di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi, tepatnya pada Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang menghasilkan beberapa **OUTPUT** penting demi berjalannya roda organisasi di Bappeda Provinsi Jambi, yaitu untuk keperluan kelengkapan umum serta pengurusan kepegawian di Bappeda Provinsi Jambi termasuk gaji dan tunjangan lainnya.



Gambar : Karyawan/karyawati Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024

3. DAN INDIKATOR SASARAN PRESENTASE PENINGKATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA PERANGKAT DAERAH.

Untuk capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, didorong dan dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketiga** yakni Indikator Sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Target dan Target Renstra.

Indikator Sasaran	Target 2024 %	Realisasi 2023 %	Realisasi Kinerja 2024 %	Capaian Kinerja T.2024 %	Target Renstra %
Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah	40	30	11,64	38,64	40

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah pada realisasi tahun 2024 dengan presentase angka sebesar 38,64%, sementara target Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 adalah 40%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah dengan didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, satu kegiatan dan dua subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26

Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Ketiga Pada Sasaran Strategis Kedua.

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Jumlah				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	0	22.000.000	2.560.000	11,64%	100,00	19.440.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	0	22.000.000	2.560.000	11,64%	100,00	19.440.000

Sumber : Data Diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada APBD Murni tahun 2024 Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berjumlah Rp.22.000.000,-. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk capaian kinerja pada tahun 2024 belum dapat terpenuhi sesuai dengan target Renstra yaitu 40 %.

Pada indikator Sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah, secara pembagian Tugas dan Fungsi (TUSI) di Bappeda Provinsi Jambi berada pada Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi, tepatnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang menghasilkan beberapa **OUTPUT** penting demi berjalannya roda organisasi di Bappeda Provinsi Jambi, yaitu untuk keperluan kelengkapan umum serta pengurusan kepegawian di Bappeda Provinsi Jambi.

Namun pada kenyataannya, walaupun Anggaran pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, tetap saja subkegiatan ini berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya Aparatus Sipil Negara (ASN) yang menjadi Fungsional Perencana Muda yaitu Ibu Samsiawati, SE.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi** dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara lain:

1. Menyempurnakan **cascading** kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan merumuskan **cascading** sampai ke level staff.
2. Menyempurnakan IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.
3. Menyempurnakan Rencana Aksi secara berjenjang.
4. Membuat Peta Proses Bisnis sesuai dengan Renstra.
5. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi secara triwulanan.
6. Menerapkan **reward** dan **punishment** dalam pencapaian kinerja ASN lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pencapaian keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini pada Organisasi perencanaan pembangunan daerah Jambi juga ditemukan beberapa **Kendala Dan Faktor Penghambat**, antara lain :

1. Belum optimalnya implementasi dan evaluasi terhadap SOP organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Bappeda sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Bappeda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar Rp.29.849.987.187,-. Lalu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun 2024 mendapat tambahan atau pergeseran anggaran sebesar Rp.800.685.903,- sehingga total anggaran yang didapati oleh Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar Rp.30.650.673.090,-.

Dapat dilaporkan bahwa kegiatan dan sub kegiatan yang mendapatkan tambahan atau pergeseran anggaran sebesar Rp.800.685.903,- adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 20.500.000,- dana tersebut digunakan untuk tambahan biaya penggandaan dan pembelian alat tulis kantor.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 750.725.903,- penggunaan dana tersebut untuk tambahan TPP dan gaji pokok pegawai.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 103.770.000,-. Pergeseran dana pada kegiatan ini difungsikan untuk pembiayaan pemeliharaan kendaraan operasional pejabat.
- d. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp. 150.000.000,- tambahan dana yang dilakokasikan pada kegiatan ini dipergunakan untuk penunjang Program Nasional yaitu penanganan kemiskinan dan Stunting.

Kemudian mempedomani tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada Bappeda Provinsi Jambi terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 47 Sub-kegiatan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran, hampir mencapai 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Berikut ini dapat disampaikan Laporan dalam bentuk Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Per-Desember 2024, Anggaran dan realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2024 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik yang dialokasikan untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.27 Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024 :

**REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**
POSISI : DESEMBER 2024

BAPPEDA

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Jenis Belanja		Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja		Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Operasi	Belanja Modal				
1	2				4	5	8	9	10	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		589.423.388	20.500.000	609.923.388	609.923.388	0	609.923.388	577.552.200	0	577.552.200	94,69	96,95	32.371.188
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.472.370	0	40.472.370	40.472.370	0	40.472.370	40.281.364	0	40.281.364	99,53	100,00	191.006
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	51.997.892	0	51.997.892	51.997.892	0	51.997.892	33.647.327	0	33.647.327	64,71	64,71	18.350.565
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	306.430.759	0	306.430.759	95,76	100,00	13.569.241
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.953.126	20.500.000	197.453.126	197.453.126	0	197.453.126	197.192.750	0	197.192.750	99,87	99,87	260.376
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.713.769.146	750.725.903	14.464.495.049	14.464.495.049	0	14.464.495.049	13.149.842.947	0	13.149.842.947	90,91	90,91	1.314.652.102
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.529.369.146	750.725.903	14.280.095.049	14.280.095.049	0	14.280.095.049	13.020.862.947	0	13.020.862.947	91,18	91,18	1.259.232.102
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.400.000	0	184.400.000	184.400.000	0	184.400.000	128.980.000	0	128.980.000	69,95	69,95	55.420.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	2.560.000	0	2.560.000	11,64	100,00	19.440.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	2.560.000	0	2.560.000	11,64	100,00	19.440.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.233.717.217	-84.195.360	1.149.521.857	1.048.507.457	101.014.400	1.149.521.857	970.716.991	0	970.716.991	84,45	84,45	178.804.866
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.124.000	-50.139.000	212.985.000	111.970.600	101.014.400	212.985.000	171.342.500	0	171.342.500	80,45	80,45	41.642.500
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.430.000	0	105.430.000	105.430.000	0	105.430.000	74.840.000	0	74.840.000	70,99	70,99	30.590.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	865.163.217	-34.056.360	831.106.857	831.106.857	0	831.106.857	724.534.491	0	724.534.491	87,18	87,18	106.572.366

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.793.108.460	0	1.793.108.460	774.841.960	1.018.266.500	1.793.108.460	739.938.644	1.014.587.130	1.754.525.774	97,85	97,85	38.582.686
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.101.320	0	354.101.320	354.101.320	0	354.101.320	319.298.644	0	319.298.644	90,17	90,17	34.802.676
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.018.266.500	0	1.018.266.500	0	1.018.266.500	1.018.266.500	0	1.014.587.130	1.014.587.130	99,64	99,64	3.679.370
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.740.640	0	420.740.640	420.740.640	0	420.740.640	420.640.000	0	420.640.000	99,98	99,98	100.640
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		740.668.500	103.770.000	844.438.500	844.438.500	0	844.438.500	814.440.668	0	814.440.668	96,45	68,80	29.997.833
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.480.000	7.520.000	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	85.457.000	0	85.457.000	99,37	37,97	543.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.170.000	6.250.000	353.420.000	353.420.000	0	353.420.000	327.375.400	0	327.375.400	92,63	92,63	26.044.600
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.018.500	90.000.000	405.018.500	405.018.500	0	405.018.500	401.608.268	0	401.608.268	99,16	54,55	3.410.233
II. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		2.661.881.200	-20.071.000	2.641.810.200	2.641.810.200	0	2.641.810.200	1.984.686.936	0	1.984.686.936	75,13	77,02	657.123.264
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	738.789.400	-50.000	738.739.400	738.739.400	0	738.739.400	578.838.318	0	578.838.318	78,35	85,13	159.901.082
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.413.500	0	40.413.500	40.413.500	0	40.413.500	29.223.000	0	29.223.000	72,31	72,31	11.190.500
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	89.967.400	0	89.967.400	89.967.400	0	89.967.400	33.723.400	0	33.723.400	37,48	37,48	56.244.000
4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	671.200.400	-20.000.000	651.200.400	651.200.400	0	651.200.400	601.389.077	0	601.389.077	92,35	92,35	49.811.323
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.121.510.500	-21.000	1.121.489.500	1.121.489.500	0	1.121.489.500	741.513.141	0	741.513.141	66,12	66,12	379.976.359

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		250.050.000	14.000	250.064.000	250.064.000	0	250.064.000	177.184.014	0	177.184.014	70,86	85,96	72.879.986
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	105.310.000	-5.830.000	99.480.000	99.480.000	0	99.480.000	83.652.248	0	83.652.248	84,09	84,09	15.827.752
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	88.280.000	0	88.280.000	88.280.000	0	88.280.000	75.802.739	0	75.802.739	85,87	85,87	12.477.261
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	56.460.000	5.844.000	62.304.000	62.304.000	0	62.304.000	17.729.027	0	17.729.027	28,46	89,09	44.574.973
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		500.091.000	-15.003.640	485.087.360	485.087.360	0	485.087.360	418.963.598	0	418.963.598	86,37	86,37	66.123.762
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	484.545.000	-15.003.640	469.541.360	469.541.360	0	469.541.360	405.608.598	0	405.608.598	86,38	86,38	63.932.762
2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.546.000	0	15.546.000	15.546.000	0	15.546.000	13.355.000	0	13.355.000	85,91	85,91	2.191.000
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		49.950.000	-15.014.000	34.936.000	34.936.000	0	34.936.000	16.614.246	0	16.614.246	47,56	100,00	18.321.754
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	49.950.000	-15.014.000	34.936.000	34.936.000	0	34.936.000	16.614.246	0	16.614.246	47,56	100,00	18.321.754
III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1.367.920.000	150.000.000	1.517.920.000	1.517.920.000	0	1.517.920.000	1.462.834.525	0	1.462.834.525	96,37	96,71	55.085.475
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.424.000	0	71.424.000	71.424.000	0	71.424.000	52.053.656	0	52.053.656	72,88	73,65	19.370.344
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	843.997.000	-50.000.000	793.997.000	793.997.000	0	793.997.000	789.399.298	0	789.399.298	99,42	100,00	4.597.702
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.048.000	0	50.048.000	50.048.000	0	50.048.000	47.774.500	0	47.774.500	95,46	95,46	2.273.500
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.216.000	0	121.216.000	121.216.000	0	121.216.000	108.250.979	0	108.250.979	89,30	89,30	12.965.021
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	231.073.000	0	231.073.000	231.073.000	0	231.073.000	220.970.982	0	220.970.982	95,63	95,63	10.102.018
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.162.000	200.000.000	250.162.000	250.162.000	0	250.162.000	244.385.110	0	244.385.110	97,69	97,69	5.776.890

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Tahun 2024

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		3.911.121.276	-40.000.000	3.871.121.276	3.867.321.676	3.799.600	3.871.121.276	3.742.057.172	3.799.600	3.745.856.772	96,76	98,86	125.264.504
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	507.890.280	0	507.890.280	507.890.280	0	507.890.280	482.614.360	0	482.614.360	95,02	95,02	25.275.920
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	608.000.000	-40.000.000	568.000.000	568.000.000	0	568.000.000	560.966.467	0	560.966.467	98,76	100,00	7.033.533
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	668.700.000	0	668.700.000	668.700.000	0	668.700.000	655.810.236	0	655.810.236	98,07	100,00	12.889.764
4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	788.363.996	0	788.363.996	784.564.396	3.799.600	788.363.996	765.637.777	3.799.600	769.437.377	97,60	97,60	18.926.619
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	720.167.000	0	720.167.000	720.167.000	0	720.167.000	687.737.781	0	687.737.781	95,50	100,00	32.429.219
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	618.000.000	0	618.000.000	618.000.000	0	618.000.000	589.290.551	0	589.290.551	95,35	100,00	28.709.449
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		3.016.287.000	-50.040.000	2.966.247.000	2.966.247.000	0	2.966.247.000	2.936.921.303	0	2.936.921.303	99,01	98,78	29.325.697
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.160.000	0	5.160.000	5.160.000	0	5.160.000	4.880.000	0	4.880.000	94,57	48,06	280.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	218.280.000	-25.730.000	192.550.000	192.550.000	0	192.550.000	188.421.500	0	188.421.500	97,86	100,00	4.128.500
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.570.000	-19.290.000	9.280.000	9.280.000	0	9.280.000	9.280.000	0	9.280.000	100,00	0,00	0
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	110.740.000	-5.020.000	105.720.000	105.720.000	0	105.720.000	104.788.772	0	104.788.772	99,12	99,12	931.228
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	298.825.905	0	298.825.905	99,61	100,00	1.174.095
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.380.915.176	0	1.380.915.176	98,64	98,64	19.084.824
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	6.450.000	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	100,00	33,33	0
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	947.087.000	0	947.087.000	947.087.000	0	947.087.000	943.359.950	0	943.359.950	99,61	100,00	3.727.050
TOTAL		29.849.987.187	800.685.903	30.650.673.090	29.527.592.590	1.123.080.500	30.650.673.090	26.994.313.244	1.018.386.730	28.012.699.974	91,39	91,34	2.637.973.117

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terkait SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah suatu selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada akhir tahun suatu anggaran. SILPA mencerminkan dana yang belum terpakai atau dana sisa setelah semua kewajiban anggaran terpenuhi. Namun SILPA yang terlalu besar juga dapat menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang efektif atau adanya hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Disisi lain SILPA juga mempunyai fungsi dan kegunaan yang bisa menguntungkan pemerintah itu sendiri yaitu ; Menambah modal pada APBD tahun berikutnya, kemudian Cadangan dana untuk menghadapi kondisi darurat serta sebagai Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk itu ada beberapa Komponen SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang dapat saja terjadi pada suatu Perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a) Saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya, dana sisa dari tahun sebelumnya yang belum digunakan.
- b) Pendapatan lebih dari target, penerimaan yang melebihi estimasi atau target yang ditetapkan.
- c) Pengeluaran yang tidak terealisasi, anggaran belanja yang ada, tetapi tidak terealisasi karena berbagai alasan (misalnya efisiensi atau keterlambatan program atau juga adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah).
- d) Pembayaran kewajiban yang tidak terealisasi, pengeluaran yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilakukan.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, maka dapat disampaikan bahwa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024 Bappeda Provinsi Jambi mengalami Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.637.973.117,-. Dengan rincian untuk kegiatan, subkegiatan yang lebih besar paling dominan diantara beberapa kegiatan, subkegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan besaran sisa anggaran sebesar Rp. 1.259.232.102,-. Penjelasan terkait dengan besarnya sisa anggaran pada kegiatan ini adalah pada APBD-Perubahan tahun 2024 penyediaan Gaji Pokok yang dianggarkan terlalu besar, penambahan dana yang diberikan oleh TAPD sebesar Rp.750.725.903,- sementara pada tahun yang sama ada banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami masa purna tugas (pensiun), dari catatan yang ada ada 5 (lima) orang yang pensiun dan 1 (satu) orang yang meninggal dunia, 2 (dua) orang golongan III dan 4 (empat) orang golongan IV. 3 (tiga) orang diantaranya adalah Jabatan Fungsional Perencana serta 1 (satu) orang eselon III. Maka dengan oleh sebab itu serapan anggaran gaji dan TPP banyak yang Silpa.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah sisa anggaran sebesar Rp. 106.572.366,-. Hal ini yang menjadi penyebabnya adalah adanya himbauan dari Gubernur Jambi, ada 2 (dua) kali Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :
- a. Surat Edaran Nomor : 1/SE/TAPD/VII/2024 Tentang Penundaan Belanja Yang Tidak Prioritas Pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2024, Tanggal 10 Juli 2024. (terlampir);
 - b. Surat Edaran Nomor : 09/SE/TAPD/XI/2024 Tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja Pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2024, Tanggal 04 November 2024. (terlampir). Oleh dikarenakan adanya Surat Edaran tersebut diatas maka kegiatan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu tidak bisa dilaksanakan.

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program ini, ada 4 (empat) Kegiatan serta 11 (sebelas) subkegiatan yang tidak maksimal dalam serapan realisasi anggarannya, jumlah silpa yang dihasilkan sejumlah Rp. 657.123.264,- 4 (empat) Kegiatan dimaksud adalah : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Alasan terkait dengan penyebabnya banyaknya Silpa pada Program ini adalah adanya himbauan dari Gubernur Jambi, ada 2 (dua) kali Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

- 1) Surat Edaran Nomor : 1/SE/TAPD/VII/2024 Tentang Penundaan Belanja Yang Tidak Prioritas Pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2024, Tanggal 10 Juli 2024. (terlampir);
- 2) Surat Edaran Nomor : 09/SE/TAPD/XI/2024 Tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja Pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2024, Tanggal 04 November 2024. (terlampir).

Dalam Surat Edaran Nomor : 09/SE/TAPD/XI/2024 Tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja Pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2024, Tanggal 04 November 2024, ditegaskan adanya penundaan belanja yang tidak prioritas yaitu mencangkup Belanja pakai habis, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor dan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara, panitia, belanja makan dan minum rapat, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, ATK, belanja jasa konsultasi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek, serta pendidikan dan latihan. Kemudian belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, belanja perjalanan dinas, KECUALI belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), BLUD, Bio-CF, DBH Sawit, DBH-DR, DBH-CHT, dan DAU Earmark. Sementara pada program ini banyak sekali kegiatan yang menggunakan atau membutuhkan pertemuan, rapat-rapat dan lain sebagainya sehingga menyebabkan Silpa yang begitu besar.

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada program ini ada 1 (satu) kegiatan yang nilainya diatas seratus juta dana yang menjadi silpa sebesar Rp. 125.264.504,- yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Pada kegiatan ini disamping adanya 2 (dua) surat edaran tersebut yang membatasi pencairan, alasan lainnya adalah adanya rincian objek belanja bahan baku minyak (BBM) yang terlambat untuk dialihkan ke sub kegiatan lain, dana BBM tersebut terdapat pada subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Diharapkan pada nantinya ditahun 2025 capaian realisasi kinerja dan anggaran akan terus mengalami peningkatan dan dibutuhkan akselerasi perbaikan pada setiap kegiatan dan subkegiatan sehingga dapat diperoleh capaian yang optimal.

3.5 Analisis Efisiensi.

Secara matriks analisis efisiensi dari 3 program, 13 kegiatan dan 47 subkegiatan pada sasaran strategis, indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.28 Analisis Efisiensi berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN Rp.	REALISASI KEUANGAN %	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-4)X100
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	3.871.121.276	3.745.856.772	96,76%	99,03%	0,97
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	1.517.920.000	1.462.834.525	96,37%	96,70%	0,96
		persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	2.966.247.000	2.936.921.303	99,01%	95,20%	0,99
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	34.936.000	16.614.246	92,35%	102,80%	0,48
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	485.087.360	418.963.598	86,37%	103,10%	0,86
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	2.641.810.200	1.984.686.936	75,13%	100%	0,75
		Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	250.064.000	177.184.014	70,86%	85,20%	0,71
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	609.923.388	577.552.200	-	-	0,95
2	Meningkatnya Akutanbilas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	14.464.495.049	13.149.842.947	90,91%	100%	0,98
		Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah	22.000.000	2.560.000	40,00%	38,80%	0,97

Sumber : Data diolah dari LPPK, Renja Bappeda Tahun 2024.

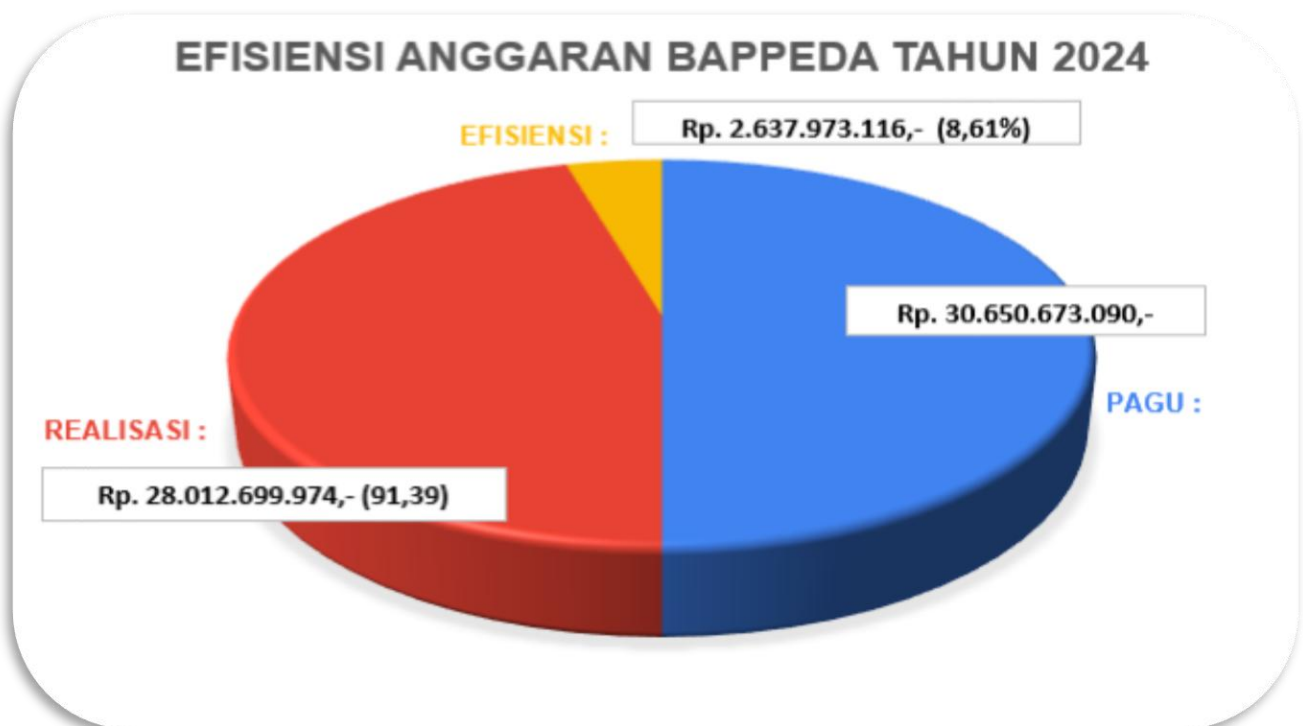
Kinerja Bappeda Provinsi Jambi selama Tahun 2024 didukung berbagai program dan kegiatan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar **Rp 30.650.673.090,-** pada akhir Tahun 2024, anggaran ini hanya terealisasi sebesar **Rp.28.012.699.974,-** atau sebesar **91,39%**. Jika dilihat realisasi anggaran persasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada Sasaran 1, Yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi tepat pada indikator kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sebesar 99,01%. Kemudian Penyerapan anggaran paling terendah terjadi pada sasaran 1, yaitu Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD sebesar 70,86 %.

ANALISIS EFFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 program, terdapat 13 kegiatan dan 47 subkegiatan yang capaian kinerjanya sudah melebihi target. Berikut diinformasikan sasaran dan indikator kinerja yang mana capaian kinerjanya melebihi target Renstra Bappeda tahun 2024 serta tingkat efisiensi yang baik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD dengan persentase 98% dengan efisiensi sebesar 1,24%.
2. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD dengan persentase 96% dengan efisiensi sebesar minus 0,37%.
3. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah dengan persentase 95% dengan efisiensi sebesar minus 4,01%.
4. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 8%.

5. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 13,63%.
6. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektorial dengan rencana spasial dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 24,87%.
7. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keterisian data dan rencana dalam SIPD dengan persentase 78% dengan efisiensi sebesar 7,14%.
8. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 5%.
9. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 9%.
10. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 5%.



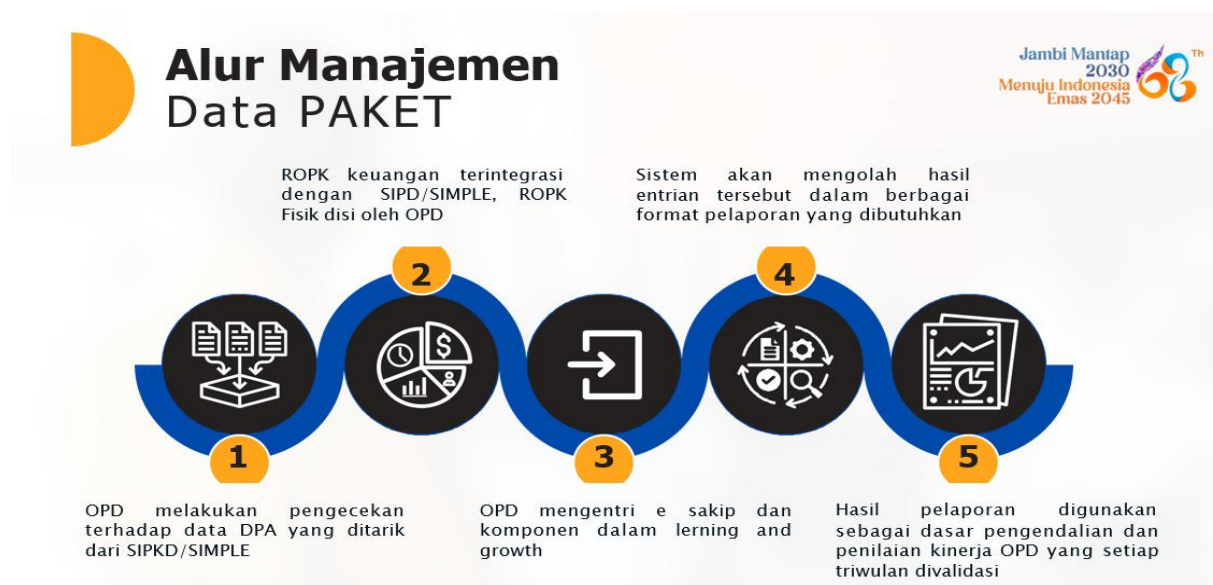
Gambar : Efisiensi Anggaran Tahun 2024
Sumber : Data Diolah (LPPK Desember 2024)

3.6. Inovasi.

Inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau memperkenalkan sesuatu yang baru atau berbeda yang bertujuan untuk memberikan solusi, meningkatkan efisiensi, atau menciptakan nilai tambah. Inovasi bisa berupa ide, produk, layanan, proses, atau teknologi yang memberikan perubahan positif dalam suatu bidang. Inovasi sering kali menjadi kunci untuk bertahan dalam persaingan dan memajukan organisasi atau masyarakat secara keseluruhan.

Pada Bappeda Provinsi Jambi telah membuat suatu aplikasi yang dinamakan “Aplikasi PAKET Jambi” (Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi) adalah sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memfasilitasi pelaporan kinerja secara terintegrasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan login dan mengakses berbagai fitur terkait pelaporan kinerja. Ide utama PAKET (Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi) ialah untuk Membantu PROVINSI JAMBI melaksanakan Pelaporan, Pengendalian, Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja (sasaran hingga sub kegiatan) serta menginformasikan kinerja kepada publik, kemudian aplikasi PAKET mendukung pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan implementasi SAKIP Pemda JAMBI.

Akuntabilitas kinerja merupakan prasyarat good governance. Berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik- baiknya pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada. Berikut disampaikan beberapa fitur serta penjelasan lainnya terkait dengan aplikasi ini, adalah sebagai berikut :





PAKET

PAKET (Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi) merupakan aplikasi e- monev yang dibangun oleh Bappeda Provinsi Jambi



Jambi Mantap 2030
Menuju Indonesia Emas 2045



Fitur e-SAKIP

Merupakan fitur manajemen kinerja berjenjang yang mengalir mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemda sampai ke Program Pemda, Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD



Fitur LogFrame

Merupakan salah satu fitur terkait aspek Perencanaan kegiatan, yaitu penilaian CSF (Critical Success Factor) dalam Log Frame, berupa asumsi eksternal yang mempengaruhi ketercapaian dan KAK Sub Kegiatan



Fitur ROPK

Fitur ROPK baik Fisik dan Keuangan merupakan fitur manajemen pengendalian pencapaian TUK fisik sub kegiatan dan sekaligus manajemen keuangan terkait aliran kas

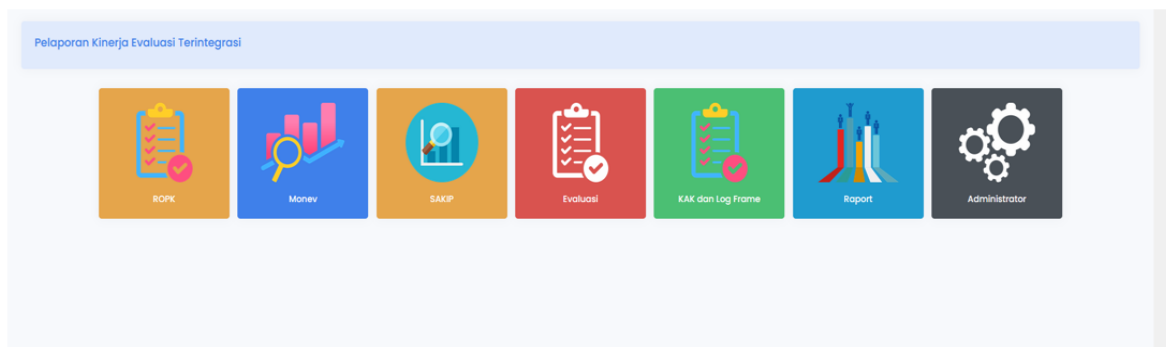


Fitur e-Money

Merupakan fitur untuk memantau kinerja capaian indikator-indikator kinerja per OPD. Dilengkapi fitur progres dan laporan yang terdiri dari sub menu : deviasi, laporan DAK, laporan inovasi, laporan grafik, laporan target, progres dll

OVERVIU PAKET

Jambi Mantap 2030
Menuju Indonesia Emas 2045



GAMBARAN UMUM MENU-MENU PAKET



Ini Untuk Login Awal Aplikasi PAKET JAMBI

Sumber : Data Diolah. Admin

3.7. Penghargaan Yang Diterima Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Bappeda Provinsi Jambi Meraih Penghargaan keterbukaan informasi publik adalah apresiasi yang diberikan kepada badan publik atas keterbukaan informasi yang dilakukan. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi menggelar malam penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2024. Anugrah ini hasil monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi yang dijalankan badan publik sebagai implementasi penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Provinsi Jambi, pada hari Rabu pukul 20.00 di Ball Room Swissbell Jambi. Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi 2024 ini dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Ketua Pusat RI H Arya Sandiyhuda, dan sejumlah Kepala Daerah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris pada kesempatan itu mengajak seluruh Instansi/badan publik di Provinsi Jambi untuk bersama-sama melakukan keterbukaan informasi agar bisa memajukan Jambi. “Saya harap sama-sama kita terbuka informasi. Selamat kepada semuanya dan terima kasih kepada KI Provinsi Jambi atas kinerja,” kata Al Haris selaku Gubernur Jambi. Dan pada kesempatan tersebut, Bappeda Provinsi Jambi berhasil masuk nominasi dan mendapatkan Penghargaan OPD terbaik dengan predikat **INFORMATIF dengan nilai 92,9**, penghargaan ini diterima langsung oleh Kasubbag Program Bappeda Bapak **Dr. Fahmi Rasid, SE., M.AP** yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jambi.



Gambar : Penghargaan Yang Didapatkan Oleh Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Penyelenggaraan program kegiatan dan subkegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2021-2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah meningkatnya kualitas perencanaan yang parstipatif, selaras dan berdampak. Dengan indikator persentase kesesuaian capaian perencanaan pembangunan daerah, realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2024 adalah sebesar 91,39%.
2. Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 90%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi, Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari beberapa bidang terkait terutama untuk data mikro, belum maksimalnya pemahaman para *stakeholder* terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, belum maksimalnya komunikasi dan kordinasi antar bidang terkait dalam ruang lingkup Bappeda Provinsi Jambi.

4.2 Tindak Lanjut Kedepan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

3. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi “Indeks Kualitas Perencanaan” yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas bisa diwujudkan.
4. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.
5. Mempersiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, memaksimalkan data informasi statistik dari beberapa bidang terkait, memaksimalkan sosialisasi kepada *stakeholder* tentang system perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan *normative*, meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar bidang terkait dalam ruang lingkup Bappeda Provinsi Jambi;
6. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspectiv*;
7. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada tahun berikutnya;
8. Selalu mengedepankan aspek responsif dan adaptatif terhadap perubahan situasi dan kondisi daerah dalam sisi perencanaan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Esselon II (Dua);**
- 2. Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jambi.**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. AGUS SUNARYO, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Januari 2024

Pihak Pertama,



Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660814 199303 1 004



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Unit Kerja : Bappeda Provinsi Jambi
2. Tugas : Membantu Gubernur Menyelenggarakan Sebagiann Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
3. Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	BAPPEDA	$\% = \frac{\text{Capaian Perencanaan Tahun } n}{\text{Target Rencana Pembangunan Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD		
		persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah		
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD		
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya		
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial		
		Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD		
	2. Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah		
		Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu		
		Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah		

Jambi, Januari 2024

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660814 199303 1 004